



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organisation



Global Geopark Network
Inscribed on the
World Heritage List in 2023



GEOPARK
SAWAHLUNTO



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BAKESBANGPOL 2024-2026

Sawahlunto, Mei 2023

1



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Selanjutnya dokumen Rencana Strategis dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dimanfaatkan sebagai acuan dan pedoman dalam merencanakan program dan kegiatan sesuai perkembangan perubahan kebijakan di Kota Sawahlunto.

Demikian Renstra ini disusun, semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk perencanaan dan peningkatan kinerja di masa mendatang.

Kepala BaDAN Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Sawahlunto



Ir. YULIANTI

NIP. 196707071994013003

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN..... 8

1.1 Latar Belakang..... 8

1.2 Dasar Hukum 10

1.3 Maksud dan Tujuan 12

1.3.1. Maksud 12

1.3.2. Tujuan 12

1.3.3.Sistematika Penulisan Renstra 13

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah 8

2.2. Sumber Daya Kesatuan Bangsa dan Politik..... 9

2.2.1. Kepegawaian 9

2.2.2. Sarana Prasarana 15

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 18

2.4. Kelompok Sasaran Layanan 26

2.4.1. Analisis Internal dan Eksternal..... 27

2.4.2 Faktor-faktor kunci keberhasilan..... 28

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 30

3.1 Permasalahan Kesatuan Bangsa dan Politik..... 30

3.2. Isu-Isu Strategis 31

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 38

4.1. Tujuan Dan Sasaran Renstra Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024-2026 38

4.2. Cascading Perangkat Perangkat Daerah.....42

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... 51

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 57

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 73

BAB VIII PENUTUP..... 75

8.1.Kesimpulan..... 75

8.2.Kaidah Pelaksanaan 75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, pemilihan kepala daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada Tahun 2024. Bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada Tahun 2023 atau pada Daerah Otonomi Baru (DOB) maka dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kepala daerah yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023 wajib menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Secara otomatis, kepala Perangkat Daerah (PD) juga wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Dokumen tersebut akan digunakan oleh penjabat (Pj) kepala daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan perlunya Rencana Strategi di tingkat unit kerja untuk mendukung perencanaan daerah. Undang-undang ini kemudian dipertegas dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menjadi dasar penyusunan Renstra ini. Dokumen Renstra disusun guna lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program dan kegiatan dilingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto, difokuskan pada kegiatan yang sifatnya spesifikasi yang bersinergi dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Kota Sawahlunto merupakan salah satu daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2023.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024-2026 merupakan kelanjutan dari Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018-2023 yang merupakan dokumen lima tahunan Perangkat Daerah yang dijadikan pedoman yang terukur beserta ketentuan pagu anggarannya bersifat indikatif, baik yang dilaksanakan langsung oleh Perangkat Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong peran serta masyarakat.

Di sisi lain, Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 ini merupakan turunan dokumen perencanaan yaitu, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sawahlunto yang secara langsung merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan program Kepala Daerah dengan memperhatikan isu strategis kota serta rumusan permasalahannya.

Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

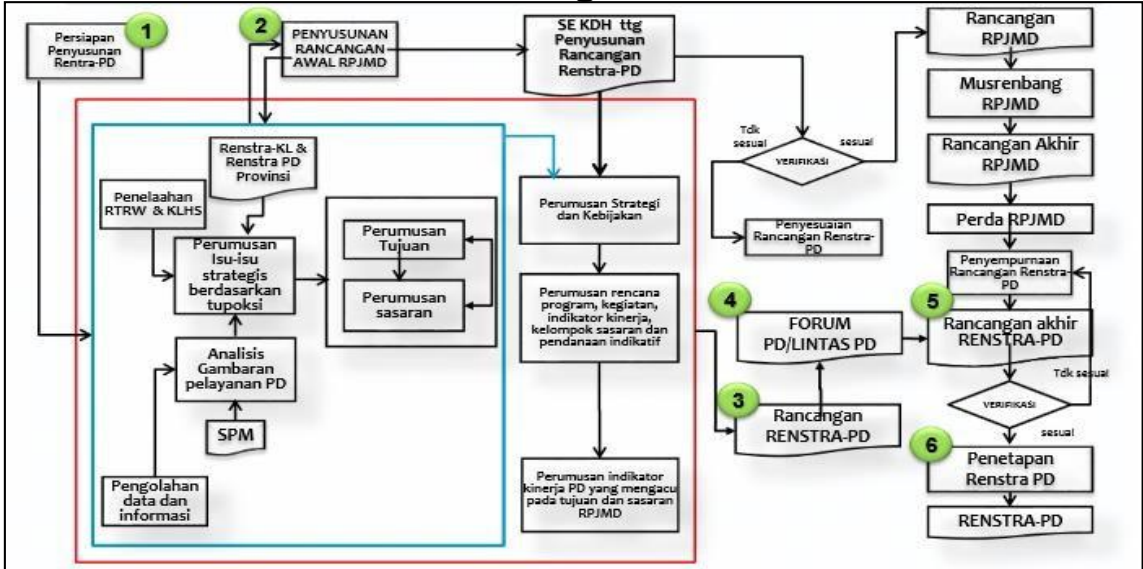
1. Penyelarasan target indikator dan program dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026.
2. Kesesuaian sasaran dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025.
3. Kesesuaian sasaran dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026.
4. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023

- 5. Isu-isu strategis yang berkembang.
- 6. Kebijakan Nasional
- 7. Regulasi yang berlaku

Dokumen Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto merupakan dasar bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Tahunan dalam 3 (Tiga) tahun ke depan, sehingga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki arah dan tujuan yang sesuai dengan arah Kebijakan Walikota. Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Dimana Rencana Strategis (Renstra) dijabarkan setiap tahun kedalam Rencana Kerja (Renja), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (Tapkin) yang ditandatangani Walikota Sawahlunto. Dokumen-dokumen tersebut adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Bakesbangpol Tahun 2024-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Gambar 1.1

Gambar 1.1 Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

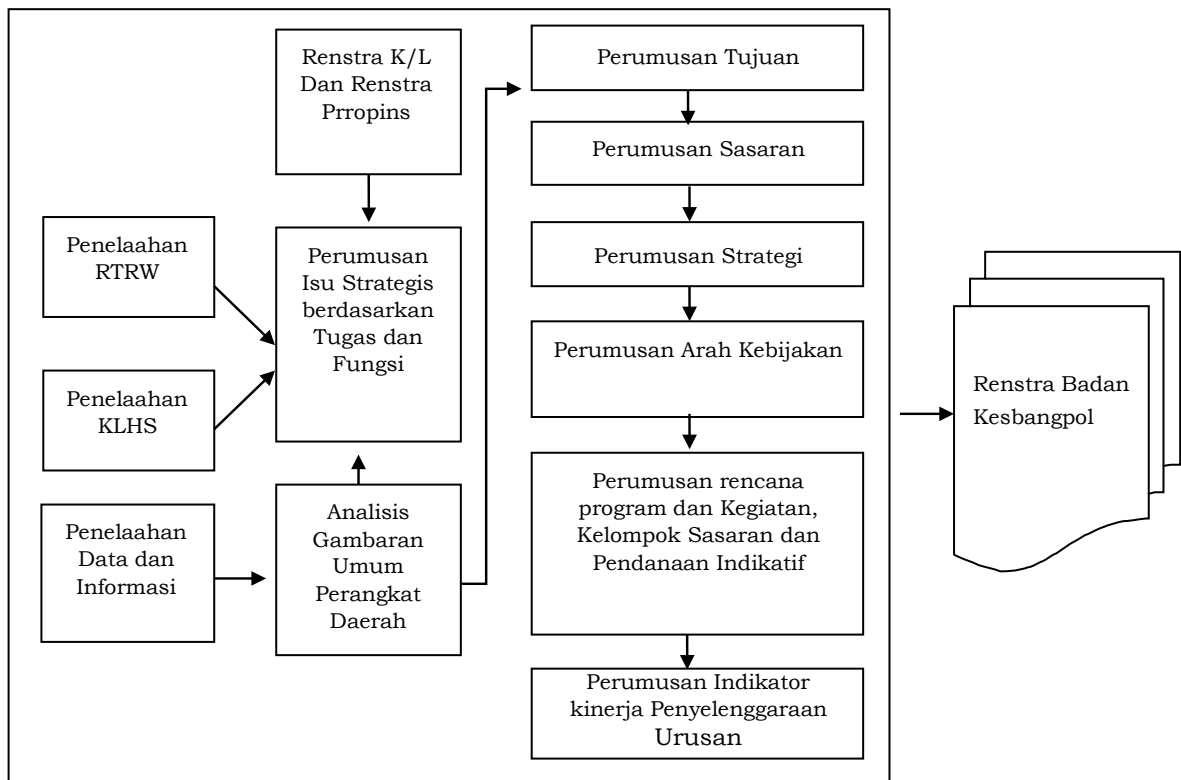
Proses penyusunan Renstra Bakesbangpol Kota Sawahlunto Tahun 2024–2026 sesuai alur tersebut, juga dilakukan melalui tahapan:

- 1) Menyusun komponen pendukung parameter keberhasilan pembangunan Bakesbangpol Kota Sawahlunto
- 2) Menganalisis komponen tersebut dengan pendekatan *logical framework*; dan
- 3) Menghasilkan pengukuran dalam perencanaan, penganggaran, pertanggungjawaban setiap perangkat Daerah, dan keterukuran dalam evaluasi.

Sebagai dokumen perencanaan, Renstra Bakesnagpol juga sebagai alat dalam mengelola keberlanjutan dan meningkatkan kinerja lembaga. Tindak lanjut Renstra Bakesbangpol Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 menjadi dasar Rencana Kerja (Renja) Bakesbangpol Tahun 2024 dan penyusunan Renja Bakesbangpol Tahun 2025 dan Tahun 2026. Keselarasan antara perencanaan tiga tahunan di Renstra Bakesbangpol dengan perencanaan tahunan dalam Renja Bakesbangpol merupakan perwujudan operasional Bakesbangpol sebagai perangkat daerah di Kota Sawahlunto.

Tahapan penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto adalah sebagai berikut :

Gambar 1.2 *Diagram Alir Tahapan Penyusunan Renstra Bakesbangpol*



1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang dijadikan pedoman dan acuan dalam penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 57 Tahun 2024 tentang Kota Sawahlunto Di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6978);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100- 441 Tahun 2019 tanggal 14 Maret 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Modifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Klasifikasi , Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
18. Peraturan Wali kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto dan Tahun 2013 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 21);
19. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 95);

20. Peraturan WaliKota nomor 36 Tahun 2022 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto;
21. Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 adalah sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan untuk periode 3 (tiga) tahun. Sebagai pedoman umum di lingkungan internal, maka secara substansial rencana strategis ini berisi arahan makro tentang segala sesuatu yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran internal dan eksternal pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Kesatuan Bangsa serta Politik Dalam Negeri dengan maksud sebagai berikut :

1. Sebagai dokumen perencanaan yang menjadi pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto dalam kurun waktu tahun 2024-2026;
2. Untuk menentukan sasaran arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam jangka menengah;
3. Sebagai dasar penilaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel;
4. Sebagai wujud kesatuan arah dari semua unsur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto dalam mewujudkan visi, misi Pemerintah selama 3 (tiga) tahun ke depan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan berpedoman kepada Perwako tentang RPD periode berkenaan;
5. Sebagai pedoman untuk merumuskan perencanaan tahunan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu:

1. Menjadi kerangka dasar bagi Bakesbangpol Kota Sawahlunto dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu Tahun 2024–2026, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sawahlunto Tahun 2024–2026 sesuai tugas dan fungsi Bakesbangpol.
2. Sebagai pedoman bagi seluruh bagian di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto dalam penyusunan Rencana Kerja yang memuat program dan kegiatan
3. Mengarahkan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota sawahlunto.
4. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan, proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto
5. Mewujudkan kesamaan pandangan, sikap dan komitmen agar dapat melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya dengan baik melalui perumusan visi, misi, tujuan, dan strategi yang akan dilaksanakan.
6. Menjamin Konsistensi Program dan Kegiatan pembangunan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan.

7. Menentukan strategi, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan, peningkatan kinerja dan produktivitas serta menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.
8. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja OPD sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan kebijakan pembangunan daerah.

1.3.3.Sistematika Penulisan Renstra

Rencana Strategis Bakesbangpol tahun 2024-2026 disusun dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan uraian singkat tentang sistematika penyusunan Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam bab ini memuat struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto, capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto periode sebelumnya dan menjelaskan hambatan-hambatan yang masih dihadapi dan perlu solusi pemecahan permasalahan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan strategis berdasarkan tugas dan fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto, telaah dan rumusan isu – isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Dalam bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto.

BAB V STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan pada akhir periode perencanaan.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menjelaskan rencana program dan kegiatan serta indikator kinerja kelompok sasaran pendanaan indikatif selama periode perencanaan serta uraian program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari strategi dan kebijakan dalam mewujudkan tujuan yang ingin dicapai.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menjelaskan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam tiga Tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan PBD Kota Sawahlunto dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 31 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Wali Kota Sawahlunto nomor 36 Tahun 2022 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto. Bakesbangpol mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, yang terdiri dari 1 Sekretariat dan 2 Bidang. Sekretariat terdiri dari 2 Sub Bagian yaitu Program, Anggaran dan Keuangan serta Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Sedangkan Bidang Kesatuan bangsa terdiri dari Kelompok Substansi Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik, serta Kelompok Substansi Ideologi Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri dari Kelompok Substansi Politik Dalam Negeri dan Kelompok Substansi Organisasi Kemasyarakatan.

Sebagaimana ditetapkan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bakesbangpol mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Sedangkan fungsinya yaitu:

Gambar 2.1
Tugas Dan Fungsi Penunjang Pemerintahan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto



Tata Kerja

1. Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Badan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal.
2. Kepala Badan bertanggungjawab memimpin, memberikan bimbingan, petunjuk, perintah dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya.
3. Kepala Badan mengadakan rapat berkala dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahan.

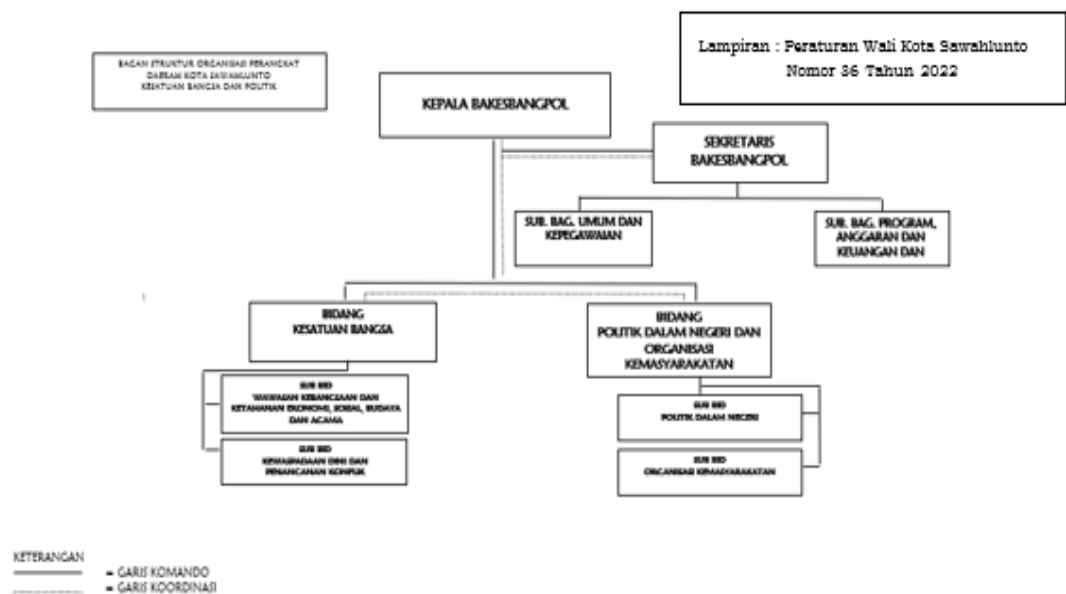
- 4. Setiap pegawai dilingkungan Badan wajib mematuhi petunjuk, perintah dan bertanggung jawab kepada atasan serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan dalam menyampaikan laporan.
- 5. Setiap pegawai dalam rangka menjamin kelancaran tugas berkewajiban memberikan saran pertimbangan kepada atasan.

Adapun Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari:

- a. Kepala Badan
- b. Sekertariat terdiri dari:
 - 1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub bagian Program, Anggaran dan Keuangan
- c. Bidang Kesatuan Bangsa terdiri dari:
 - 1. Kelompok Substansi Ideologi Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama
 - 2. Kelompok Substansi Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik
- d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri dari:
 - 1. Kelompok Substansi Politik Dalam Negeri
 - 2. Kelompok Substansi Organisasi Kemasyarakatan

Secara skematis Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut:

Gambar 2.2
Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto



2.2. Sumber Daya Kesatuan Bangsa dan Politik

2.2.1. Kepegawaian

Untuk melaksanakan tugas pokok fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto didukung 17 (Tujuh belas orang) pegawai, yang terinci sebagai berikut :

Tabel 2.1
Klasifikasi ASN Bakesbangpol Kota Sawahlunto
Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	IV	5
2	III	10
3	II	1
4	I	-
	Total	16

Berdasarkan tabel diatas, ASN bakesbangpol tidak ada yang bergolongan I dan mayoritas bergolongan III dengan jumlah 7 pegawai ASN.

Tabel 2.2
Klasifikasi Pegawai Bakesbangpol Kota Sawahlunto
Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	5 Orang
2.	Perempuan	11 Orang
	JUMLAH	16 Orang

Berdasarkan tabel diatas mayoritas pegawai di Bakesbangpol adalah laki-laki dengan jumlah 5 orang dan perempuan sejumlah 11 orang.

Tabel 2.3
Klasifikasi Pegawai Bakesbangpol Kota Sawahlunto
Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status kepegawaian	Jumlah
1.	PNS	16 Orang
2.	Tenaga kontrak	1 Orang
3.	Adsorsing	1 Orang
	JUMLAH	18 Orang

Berdasarkan tabel diatas mayoritas status kepegawaian di Bakesbangpol adalah PNS dengan selisih satu orang dengan pegawai kontrak dan 1 orang tenaag adsorsing. Hal ini menunjukan bahwa pegawai bersetatus ASN perlu ditambah.

Tabel 2.4
Klasifikasi Pegawai Bakesbangpol Kota Sawahlunto
Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	PNS	PPPK	TKK	Jumlah
1	S2	5	-	-	5
2	S1/D4	10	-	1	11
3	D3	-	-	-	-
4	SMA/Sederajat	-	-	1	1
5	SMP/Sederajat	1	-	-	1
	Total	16	-	2	18

Berdasarkan tabel 2.4, mayoritas pegawai Bakesbangpol memiliki pendidikan terakhir S1/D4. Sedangkan kualifikasi pendidikan terakhir D3 dan SMP/Sederajat tidak ada. Dapat disimpulkan untuk kualifikasi pendidikan terkahir S2 dirasa masih kurang sehingga kompetensi pegawai masih perlu untuk ditingkatkan.

Tabel 2.5
Klasifikasi Pegawai Bakesbangpol Kota Sawahlunto
Berdasarkan Jabatan

No	Posisi	Jabatan	Jumlah
1.	Pimpinan	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1 orang
2.	Sekretaris	Sekretaris	1 orang
		Kasubbag	2 orang
		Staf	3 orang
3.	Bidang Kesbang	Kepala Bidang	1 orang
		Kepala Sub Bidang	2 orang
		Staf	2 orang
4.	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Kepala Bidang	1 orang
		Kepala Sub Bidang	2 orang
		Staf	3 orang

Berdasarkan tabel diatas, Bakesbangpol terdiri dari dua bidang dan satu sekretariat serta dipimpin oleh seorang Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Dimana setiap bidang terdiri dari satu Kepala Bidang, dua Kepala Sub Bidang dan beberapa staf. Sedangkan untuk sekretariat terdiri dari sekretaris, dua kasubag dan beberapa staf. Dapat disimpulkan bahwa setiap bidang memiliki dua Kasubid namun jumlah staf yang ada masih dirasa kurang untuk membantu pencapaian kinerja disetiap bidang.

2.2.2. Sarana Prasarana

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH		Ket
Nomo r	Kode Barang	Register	Nama/Jenis Barang	Merk/Type	No Sertifikat No Pabrik No Chasis No Mesin		Barang	Harga	
1	2	3	4	5	6	12	13	14	15
1	02.02.01.02.003	000004	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	TOYOTA / AVANZA 1.3 G M/T	MHKM11BA3JEJ084415 MD70240	Baik	1	166.270.000	Kabid Kesbang (BA 1996)
2	02.02.01.04.001	000017	Sepeda Motor	SUZUKI / FK 110D	MHBE4DLA81-116709 E451-ID-629469	Baik	1	10.890.000	Kasubid Politik Dalam Negeri dan HAL
3	02.02.01.04.001	000003	Sepeda Motor	HONDA / NF125TD M/T (SUPRA X 125)	MH1JB8118CK77985 JBB11773568	Baik	1	13.997.390	KasubiD IDEOLOGI & WASBANG
4	02.02.01.04.001	000004	Sepeda Motor	HONDA / NF 125 TD / SUPRA X 125	MH1JB81127K056910 JBB1E1057777	Baik	1	12.897.500	Kasubag Administrasi Umum dan Kepegawaian
5	02.05.01.04.002	000001	Lemari Kayu	-	-	Baik	1	650.000	Keuangan
6	02.05.01.04.005	000001 s/d 000002	Filing Cabinet Besi	Ecalac	-	Baik	1	2.750.000	Kesbang
7	02.05.02.06.021	000001 s/d 000002	Camera Video	-	-	Baik	1	7.705.000	Umum
8	02.05.03.01.004	000001	Meja Kerja Pejabat Eselon II	DONATI	-	Baik	1	1.683.000	Meja pak ilam hitam

9	02.05.03.01.005	000001 s/d 000003	Meja Kerja Pejabat Eselon III	-	-	Baik	1	2.640.000	Meja kabit kesbang
10	02.05.03.01.006	000001 s/d 000003	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	-	-	Baik	5	5.890.500	Aplikasi
11	02.05.03.01.007	000001	Meja Kerja Pejabat Eselon V	-	-	Kurang Baik	1	1.496.000	umum
12	02.05.03.03.005	000001 s/d 000003	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Fantony	-	Baik	1	1.782.000	Kursi kabit kesbang
13	02.05.03.03.006	000001 s/d 000009	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Fantony	-	Baik	2	2.772.000	kursi kasubid kesbang 2
14	02.05.03.04.007	000001 s/d 000015	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	Futura	-	Baik	7	4.196.500	kursi biru staf
15	02.10.01.02.002	000015	Lap Top	TOSHIBA	-	Baik	1	6.710.000	Bidang kesbang (ayu)
16	02.10.01.02.002	000017	Lap Top	-	-	Baik	1	5.995.000	Keuangan
17	02.10.01.02.002	000001 s/d 000002	Lap Top	ASUS	-	Baik	1	7.975.000	Laptop maria
18	02.10.01.02.002	000035	Lap Top	Lenovo / IP330- 14AST	-	Baik	1	6.000.000	Laptop ires
19	02.10.01.02.002	000001 s/d 000002	Lap Top	LENOVO IP3 / intel Core i5 RAM	-	Baik	1	16.247.000	Laptop buk sek
20	02.10.01.02.002	000001 s/d 000004	Lap Top	Asus	-	Baik	2	15.180.000	Laptop pak ilam + novan
21	02.10.02.03.003	000021	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon	-	Baik	1	3.000.000	printer disti lama

22	02.10.02.03.003	000023	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson L.360	-	Baik	1	2.500.000	Printer novan
23	02.10.02.03.003	000001 s/d 000002	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / L3110	-	Baik	1	2.368.000	Bidang kesbang (maria)
24	02.10.02.03.003	000027	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon / IP 2770	-	Baik	1	837.000	Printer buk sek
25	02.10.02.03.003	000001 s/d 000003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Laserjet	-	Baik	1	1.595.000	Bidang kesbang (lusi)
26	02.05.03.01.006	000001 s/d 000005	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	-	-	Baik	5	4.482.500	Bidang kesbang
27	02.05.03.01.006	000001 s/d 000003	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	-	-	Baik	3	2.782.730	umum
						Total	45	311.292.120	

Sumber : Kesatuan Bangsa dan Politik

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam kapasitasnya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, telah dirumuskan indikator sasaran dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Sawahlunto

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Ta ke-					Realisasi Kinerja Renstra Perangkat Daerah Ta ke-					Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Ta ke-				
								2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan Nilai Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat Kota Sawahlunto	Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat Berdasarkan Nilai-Nilai Ideologi Pancasila	Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Kota Sawahlunto	-	-	-	IKU	65	60	20	15	10	48	8	20	25	0	74	13	100	100	2,5

Dari tabel 2.1 di atas dapat dijelaskan, pencapaian indikator kinerja Bakesbangpol Kota Sawahlunto selama periode 2019-2023 adalah sebagai berikut :

I. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN UMUM

a. Indikator Kinerja Utama Bakesbangpol

Penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban di Kota Sawahlunto Dilihat dari Realisasi Kinerja menunjukkan realisasi belum mencapai target yang ditetapkan 60 % untuk tahun 2020 dengan Target Indikator persentase penurunan gangguan ketenraman dan keteriban di Kota Sawahlunto, hal ini menunjukkan di tahun 2020 gangguan keamanan dan ketertiban di Kota Sawahlunto menurun 8%. pada tahun 2021 capaian kinerja 2% dan tahun 2022 capaian kinerja 100% dalam arti tidak terdapat kenaikan dan penurunan dari tahun sebelumnya. Jumlah kasus tahun 2022 sama dengan jumlah kasus sebelumnya. 2021.

Pada tahun 2023 Pencapaian kinerja Bakesbangpol adalah ketentraman dan ketertiban adalah kejadian/kasus di masyarakat berlatang belakang kasus yang berpotensi untuk menjadi konflik yaitu, Persentase Penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban di Kota Sawahlunto merupakan perbandingan antara jumlah kasus tahun sebelumnya dikurang kasus tahun berjalan dibagi kasus tahun sebelumnya (n) dengan jumlah kasus tahun berjalan tahun sebelumnya (n-1), dengan rumusan dari indikator diatas adalah:

$$\frac{\text{Jumlah Kasus Tahun Sebelumnya} - \text{Jumlah Kasus Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Kasus Tahun Sebelumnya}} \times 100$$

$$\text{Hasil Yang didapatkan Tahun 2022 } \frac{4-3}{4} \times 100 = 25$$

Yakni Persentase Penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban di Kota Sawahlunto yang ditindaklanjuti realisasi pada tahun 2021 sebesar 40% dengan capaian kinerja 2% dan 2022 sebesar 0% hal ini berdasarkan kinerja indikator pada tahun dimaksud yang telah menindaklanjuti seluruh kejadian/kasus yang dilaporkan, pada tahun 2021 terdapat 3 kejadian/kasus dan pada tahun 2022 total berjumlah 3 kejadian/kasus. Jadi pencapaian kinerja Persentase Penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban di Kota Sawahlunto pada tahun 2022 tidak ada peningkatan dari tahun 2021. Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 2% dari tahun 2020. Pada tahun 2023 realisasi sebesar 25% dengan capaian kinerja 2,5% Hal tersebut membuktikan bahwa Bakesbangpol Kota Sawahlunto telah berhasil membangun koordinasi yang baik secara intensif dengan Pemerintah Kabupaten/Kota serta Jajaran Instansi terkait dalam melakukan pemantauan perkembangan situasi dan kondisi di Kota Sawahlunto. Keberhasilan yang telah dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh 5 Program.

Bakesbangpol telah berhasil membangun sinergitas dalam upaya meningkatkan kewaspadaan dari ancaman organisasi radikal, gangguan kamtibmas sebagai upaya pencegahan konflik sosial di daerah, setiap kejadian yang berpotensi menjadi konflik terbuka dapat ditindaklanjuti dengan cepat bersama aparat serta jajaran instansi terkait sehingga dapat dilakukan langkah – langkah strategis dalam meredam kejadian tersebut, dan kondusifitas Kota Sawahlunto dapat terjaga. Bakesbangpol juga secara rutin melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan peran dari seluruh elemen masyarakat di Kota Sawahlunto dalam menjaga dan memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Indikator ini memiliki makna progres positif, dimana perkembangan Penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban di Kota Sawahlunto dapat terselesaikan dari yang ditargetkan dan menurun dari tahun ke tahun dari jumlah kejadian/kasus yang ditargetkan dapat terselesaikan.

Dilihat dari capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik periode 2021 – 2022 dapat dikatakan berjalan sesuai dengan yang diharapkan dimana tidak ada kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini sangat didukung oleh berbagai hal seperti:

1. Sinergitas yang berhasil dijalin dengan baik oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan berbagai pihak baik mitra maupun stakeholder sehingga dukungan mereka untuk mensukseskan setiap program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat terlihat.
2. Kondusifitas Kota Sawahlunto yang dapat terjaga dengan baik karena sinergitas dengan berbagai pihak dan forum yang ada dalam mengendalikan konflik sosial yang terjadi di Kota Sawahlunto.

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto

NO	KODE REKENING	NAMA SUB KEGIATAN	ANGGARAN		REALISASI		RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN		RATA-RATA PERTUMBUHAN	
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	ANGGARAN	REALISASI
A	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	3.988.747.600	4.390.707.870	3.765.813.927	3.809.853.859	94,41	86,76	10.08	1.17
I	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	3.988.747.600	4.390.707.870	3.765.813.927	3.809.853.859	94,41	86,77	10.08	1.17
1	1.05.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANAGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	5.648.400	4.277.750	0	4.249.220	0	99,33	- 24.27	-
(1)	1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.648.400	4.277.750	0	4.249.220	0	99,33	- 24.27	-
2	1.05.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.231.627.200	3.112.911.000	3.029.220.129	2.606.511.800	93,74	84,00	- 3.67	- 13.95
(1)	1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.231.627.200	3.112.911.000	3.029.220.129	2.606.511.800	93,74	84,00	- 3.67	- 13.95
3	1.05.01.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	49.970.000	24.950.000	49.020.000	23.158.700	98,10	93,00	- 50.07	- 52.76
(1)	1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	10.000.000	13.950.000	10.000.000	13.508.700	100	97,00	39.50	35.09
(2)	1.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	39.970.000	11.000.000	39.020.000	9.650.000	97,62	88,00	- 72.48	- 75.27
4	1.05.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	285.452.730	228.928.620	281.047.240	216.564.018	98,46	95,00	- 19.80	- 22.94
(1)	1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.402.000	6.500.000	5.394.640	6.500.000	99,86	100	20.33	20.49
(2)	1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	85.505.730	43.152.620	85.485.606	42.588.048	99,98	99,00	- 49.53	- 50.18
(3)	1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.740.000	21.738.000	21.038.000	20.557.800	06,77	95,00	- 0.01	- 2.28
(4)	1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33.480.000	35.000.000	33.479.950	34.999.796	99,99	100	4.54	4.54
(5)	1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.885.000	2.800.000	2.640.000	2.760.000	91,51	99,00	- 2.95	4.55

NO	KODE REKENING	NAMA SUB KEGIATAN	ANGGARAN		REALISASI		RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN		RATA-RATA PERTUMBUHAN	
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	ANGGARAN	REALISASI
(6)	1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	136.440.000	119.738.000	133.009.044	109.158.374	97,49	91,16	- 12.24	- 17.93
5	1.05.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	209.455.320	786.773.000	206.099.867	733.906.209	98,40	93,28	275.63	256.09
(1)	1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	168.763.620	4.210.000	168.530.466	4.000.000	99,86	95,01	- 97.51	- 97.63
(2)	1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.691.700	48.399.000	37.569.381	32.775.703	92,33	68,00	18.94	- 12.76
(3)	1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0	734.164.000	0	697.130.506	0	95,00	-	-
6	1.05.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	200.593.950	232.867.500	200.426.711	225.463.912	99,92	97,00	16.09	12.49
(1)	1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraann Dinas Operasional atau Lapangan	138.633.800	169.177.500	138.606.561	162.668.572	99,98	96,15	22.03	17.36
(2)	1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	42.890.150	50.000.000	42.885.150	49.785.340	99,99	99,57	16.58	16.09
(3)	1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.070.000	13.690.000	18.935.000	13.010.000	99,29	95,03	- 28.21	- 31.29
B	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.954.217.624	1.813.152.874	1.840.589.321	1.714.169.889	94,19	95,00	- 7.22	- 6.87
II	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	49.190.200	107.660.000	42.506.802	88.552.230	86,13	82,25	118.86	108.32
1	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	49.190.200	107.660.000	42.506.802	88.552.230	86,13	82,25	118.86	108.32
(1)	8.01.02.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhimeka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	0	107.660.000	0	88.552.230	0	82,25	-	-
		Penyusunan Program Kerja Di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan	49.190.200	0	42.506.802	0	86,13	0	- 100.00	- 100.00

NO	KODE REKENING	NAMA SUB KEGIATAN	ANGGARAN		REALISASI		RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN		RATA-RATA PERTUMBUHAN	
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	ANGGARAN	REALISASI
III	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	0	584.664.124	0	584.664.124	0	100	-	-
1	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah serta situasi Politik	0	584.664.124	0	584.664.124	0	100	-	-
(1)	8.01.03.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum /Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	0	584.664.124	0	584.664.124	0	100	-	-
IV	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	1.206.960.424	1.002.243.250	1.156.080.319	926.684.487	95,78	92,46	- 16.96	- 19.84
.1	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	1.206.960.424	1.002.243.250	1.156.080.319	926.684.487	95,78	92,46	- 16.96	- 19.84
(1)	8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	0	100.000.000	0	100.000.000	00	100	-	-
(2)	8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1.206.960.424	902.243.250	1.156.080.319	826.684.487	95,78	91,63	- 25.25	- 28.49
V	8.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	0	118.585.500	0	114.269.048	0	96,36	-	-
1	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	0	118.585.500	0	114.269.048	0	96,36	-	-

NO	KODE REKENING	NAMA SUB KEGIATAN	ANGGARAN		REALISASI		RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN		RATA-RATA PERTUMBUHAN	
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	ANGGARAN	REALISASI
(1)	8.01.06.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing , Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	0	118.585.500	0	114.269.048	0	96,36	-	-
VI		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	698.067.000	0	642.002.200	0	91,97	0	- 100.00	- 100.00
		Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	698.067.000	0	642.002.200	0	91,97	0	- 100.00	- 100.00

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Sesuai dengan perkembangan pembangunan nasional yang mengarahkan kepada kebijakan pembangunan untuk pencapaian prioritas nasional maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan meliputi ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, penghargaan kebangsaan dan melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dilimpahkan atau diberikan oleh pemerintah pusat untuk terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa serta terjaminnya sistim politik yang demokratis.

Berdasarkan analisis terhadap pelaksanaan Renstra 5 tahun sebelumnya menunjukkan bahwa pelayanan belum berjalan secara maksimal karena beberapa faktor antara lain :

- a. Terbatasnya pembiayaan untuk mendukung capaian target.
- b. Kurangnya kualitas aparatur pengelola dalam Penerapan sehingga Program/Kegiatan yang dilaksanakan tidak mengakomodir pencapaian target yang mesti dicapai.
- c. Kurangnya koordinasi antara semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian program dan kegiatan
- d. Kurang memadainya sarana dan prasarana pendukung dalam pencapaian target indikator kinerja.

Berdasarkan analisis terhadap pelaksanaan Renstra Perubahan Badan Kesbangpol Kota Kota Sawahlunto terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelayanan bidang kesatuan bangsa dan politik yaitu :

- Belum optimalnya koordinasi dan pelaporan dari jajaran Kesbangpol;
- Terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan rapat dan koordinasi
- Kualitas sumber daya aparatur dalam penguasaan IPTEK belum memadai.

Untuk menajalankan tugas tersebut diperlukan koordinasi dan penyusunan program/kegiatan yang dapat mempercepat tercapainya tujuan tersebut. Namun demikian, masih adanya tantangan yang dihadapi oleh Badan Kesbangpol yang berpengaruh terhadap pencapaian target

Dari berbagai analisis yang telah dilakukan dapat diidentifikasi berbagai macam pelayanan, perkiraan besarnya kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan. Adapun jenis layanan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto berikut:

Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran

No	Jenis Pelayanan	Kelompok Sasaran
1.	Penyelenggaraan pembinaan dan penguatan ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, pembauran kebangsaan dan penghargaan kebangsaan	Masyarakat, pelajar, mahasiswa, organisasi masyarakat/organisasi kepemudaan, Perempuan, Tokoh masyarakat, Aparat
2.	Penyelenggaraan pembinaan karakter bangsa, bela negara, cinta tanah air, dan kejuangan.	Masyarakat, pelajar, mahasiswa, organisasi masyarakat/organisasi kepemudaan, Perempuan, Aparat
3.	Penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi kehidupan demokrasi, HAM, dan pendidikan polik.	Masyarakat, pelajar, mahasiswa, organisasi masyarakat/organisasi kepemudaan, Parpol, Perempuan

4.	Penyelenggaraan pemantauan pemilihan umum serta pemilihan Kepala Daerah	Masyarakat, penyelenggara pemilihan umum/Pilkada, Aparat
5.	Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, dan fasilitas kelembagaan partai politik	Partai Politik
6.	Penyelenggaraan pembinaan ketahanan nasional dan kerukunan masyarakat	Masyarakat, pelajar, mahasiswa, organisasi masyarakat/organisasi kepemudaan, forum kemitraan (FKUB dll), Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Aparat
7.	Penyelenggaran pelayanan, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi organisasi kemasyarakatan	Ormas/LSM, Masyarakat
8.	Penyelenggaraan Pembinaan, pengkoordinasian Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika	Masyarakat, pelajar, mahasiswa, organisasi masyarakat/organisasi kepemudaan, perempuan, Pemuda, Pondok Pesantrean, Aparat
9.	Penyelenggaraan pembinaan masyarakat dan pengoordinasian pencegahan, penanganan, pemulihan pasca konflik.	Masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, Aparat, perempuan, instansi terkait
10.	Pengoordinasian Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, kerja sama intelijen, pemantauan daerah rawan konflik.	Forkopimda, forum kemitraan, Aparat, intelijen
11.	Penyelenggaran kewaspadaan nasional dan fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, pengawasan aktivitas Lembaga Asing maupun Orang Asing.	Masyarakat, Aparat, Perempuan, Intelijen, Organisasi/lembaga Asing, Orang Asing, Peneliti Asing, FKDM

2.4.1. Analisis Internal dan Eksternal

Untuk mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran, perlu adanya identifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja Perangkat Daerah, adapun faktor dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Faktor Internal

- 1) Kekuatan
 - a) Adanya Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah.
 - b) Adanya Peraturan Walikota tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto.
 - c) Adanya akses yang baik kepada Infra struktur politik dan supra struktur politik.
 - d) Adanya bentuk jejaring sebagai wadah koordinasi lintas sectoral.
 - e) Urusan kesatuan bangsa dan politik merupakan urusan strategis, sebagai syarat dasar pembangunan dapat berjalan
 - f) Adanya sumber daya manusia dan komitmen dari aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk melaksanakan program kegiatan secara optimal.
 - g) Adanya dana dan dukungan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk melaksanakan program-program pemerintah daerah khususnya program dan kegiatan yang menyangkut bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
 - h) Adanya sarana dan prasarana yang cukup.
- 2) Kelemahan
 - a) Sumber daya manusia yang ada belum sebanding dengan beban tugas
 - b) Terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan kegiatan OPD

- c) Terbatasnya dana yang tersedia di dalam pelaksanaan kegiatan sehingga tidak bisa dilaksanakan secara maksimal.
- b. Faktor Eksternal
- 1) Peluang
 - a) Stabilitas daerah yang cukup kondusif.
 - b) Banyaknya organisasi di masyarakat.
 - c) Kerjasama yang baik antar instansi vertical.
 - d) Tersedianya pedoman untuk acuan.
 - e) Kebutuhan masyarakat terhadap peran Pemerintah dalam pemberdayaan infra dan supra struktur politik, penguatan ideologi dan wawasan kebangsaan, serta peningkatan kualitas Demokrasi masih sangat besar.
 - f) Jaringan informasi terutama dalam hal pencegahan dan penanganan konflik sosial sangat membutuhkan peran pemerintah daerah.
 - g) Isu permasalahan strategis yang dirumuskan Bakesbangpol sebagian besar merupakan isu nasional yang menjadi fokus dan perhatian berbagai pihak.
 - 2) Ancaman
 - a) Adanya potensi terjadinya konflik.
 - b) Mobilitas sumber daya manusia cukup tinggi.
 - c) Alih fungsi sarana dan prasarana yang ada.
 - d) Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi urusan kesatuan bangsa dan politik.
 - e) Kondisi masyarakat saat ini dalam era teknologi informasi membuat sangat dinamis, sehingga potensi konflik lebih sulit untuk diprediksi

2.4.2 Faktor-faktor kunci keberhasilan

Faktor-faktor kunci keberhasilan yang dapat diidentifikasi berdasarkan faktor internal dan eksternal adalah sebagai berikut:

- a. Adanya komitmen bersama untuk menjaga situasi Sawahlunto tetap kondusif
- b. Adanya komitmen pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia.
- c. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada secara maksimal
- d. Pemanfaatan dana yang tersedia oleh pemerintah dan masyarakat secara maksimal
- e. Tersedianya jejaringan kerja dan data yang akurat untuk terlaksananya perencanaan pembangunan yang partisipatif
- f. Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertical maupun horizontal, terutama dalam memberi bimbingan, petunjuk, pemerintah maupun pengawasan tugas
- g. Termanfaatkannya Renstra sebagai acuan untuk perencanaan lainnya

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

3.1 Permasalahan Kesatuan Bangsa dan Politik

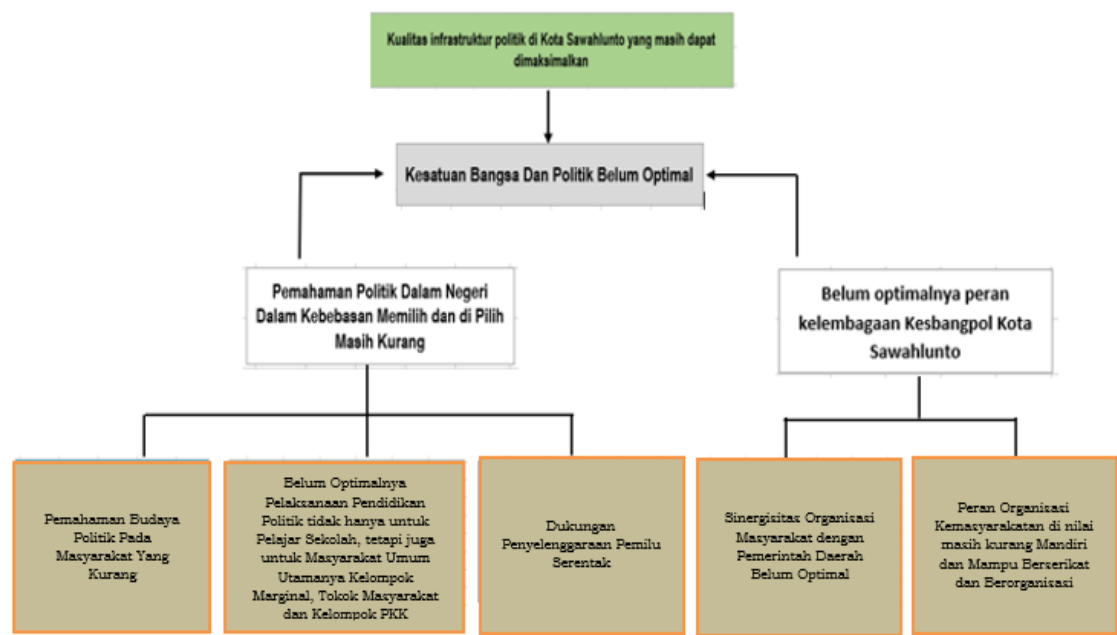
Kota Sawahlunto identik dengan kota wisata, di mana dikenal dengan wisata tambang dan budayanya. Hal ini menjadikan Kota Sawahlunto sebagai kota yang sangat terbuka menerima pengaruh dari luar baik yang bersifat budaya maupun ideologi. Tentu saja ini bisa dipandang sebagai potensi namun tak jarang juga menimbulkan permasalahan baik yang bersifat horizontal maupun vertikal. Keterbukaan informasi yang saat ini terjadi menjadikan kita semua harus selalu waspada terhadap pengaruh-pengaruh yang sekiranya berbahaya bagi kesatuan dan persatuan bangsa. Penguatan karakter dan jati diri menjadi sebuah keniscayaan yang harus dilakukan oleh Pemerintah untuk mempertahankan NKRI dari gangguan yang bersifat laten maupun nyata yang berasal dari dalam maupun luar. Inilah yang menjadi titik perhatian termasuk Pemerintah Kota Sawahlunto dengan mempertimbangkan heterogenitas yang ada di kota ini.

Seiring sejalan dengan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah kota Sawahlunto melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan mendasarkan pada Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 31 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto, dan diubah Peraturan Wali Kota nomor 36 Tahun 2022 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi pelaksanaan kewenangan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik. Berbeda dengan penyusunan Renstra sebelumnya tahun 2018-2023, pada saat kelembagaan masih berbentuk Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah, dan hanya terdiri dari 1 seksi yaitu Kesatuan Bangsa Politik, dan 1 sub bagian yaitu Tata Usaha dan hanya membawahi urusan Pemerintah di Bidang Kesatuan Bangsa. Adapun permasalahan-permasalahan yang dijumpai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Kualitas infrastruktur politik di Kota Sawahlunto yang masih dapat dimaksimalkan	Belum optimalnya peran kelembagaan Kesbangpol Kota Sawahlunto	Sinergisitas organisasi kemasyarakatan dengan Pemerintah Daerah Belum Optimal
	Belum optimalnya peran organisasi kemasyarakatan	Peran Organisasi Kemasyarakatan dinilai Masih Kurang Mandiri
	Pemahaman Politik Dalam Negeri Dalam Kebebasan Memilih dan di Pilih Masih Kurang	Pemahaman Budaya Politik Pada Masyarakat Yang Kurang
		Belum Optimalnya pelaksanaan pendidikan politik tidak hanya untuk pelajar sekolah, tetapi juga untuk masyarakat umum utamanya kelompok marginal, tokoh masyarakat dan kelompok PKK
		Dukungan penyelenggaraan pemilu serentak

Gambar 3.1 Pohon Masalah



3.2. Isu-Isu Strategis

Sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di daerah, maka keluaran (ouput) kegiatan yang dihasilkan adalah dokumen kegiatan. Dokumen kegiatan tersebut merupakan suatu proses yang berkesinambungan dan berkelanjutan dari tahap penentuan alternatif rencana kegiatan sampai dengan penyusunan kebijakan dalam pelaksanaan.

Perencanaan yang disusun berdasarkan pada kondisi umum yang ada saat ini, yang akan diperbaiki melalui program kegiatan pembangunan. Kondisi umum daerah saat ini secara makro adalah sebagai Kota Sawahlunto memiliki keindahan alam, nilai historis dan budaya yang spesifik sehingga mempunyai daya tarik tersendiri yang tercermin dalam setiap obyek wisata yang memiliki nilai historis serta tetap tumbuh dan berkembang budaya multi etnis yang ada, dengan ciri khas daerah Kota Sawahlunto tersebut diatas perlu dikemas sedemikian rupa sehingga dapat menarik jumlah wisatawan berkunjung ke Kota Sawahlunto. Daya tarik daerah yang demikian harus dapat dimanfaatkan oleh Kota Sawahlunto untuk menjadi salah satu daerah tujuan wisata di Sumatera dengan wisata tambang dan budaya dengan segala ciri khasnya.

Kondisi tersebut menyebabkan munculnya persoalan klasik karena setiap budaya mempunyai karakter yang berbeda. Hal itu memerlukan perhatian kita bersama serta pemahaman yang mendalam terhadap keberadaan masing-masing baik masyarakat Sawahlunto maupun warga pendatang, sehingga akan timbul kebersamaan saling menghargai terhadap adat istiadat maupun budaya masing-masing. Kondisi tersebut tidak menutup kemungkinan akan dimanfaatkan oleh oknum yang tidak menghendaki suasana tenteram, damai untuk memunculkan konflik. Sejalan dengan hal tersebut, diharapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat bersinergi dengan instansi lain untuk menurunkan intensitas dan frekuensi konflik sosial yang ditimbulkan karena isu SARA dan kesenjangan sosial dari tahun ke tahun. Ada pun kondisi umum daerah secara makro yang diinginkan atau diproyeksikan ke depan adalah meningkatkan moral, etika, dan budaya untuk mewujudkan ketentraman masyarakat Kota Sawahlunto.

Salah satu arah kebijakan pembangunan adalah meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan menuju bangsa yang berkarakter dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu dengan membangun bangsa dan watak bangsa (*nation and character building*) menuju bangsa dan masyarakat Indonesia yang maju, rukun, damai, demokratis, dinamis, toleran, sejahtera, adil dan makmur, maka diperlukan peningkatan pemahaman tentang wawasan kebangsaan dan Ideologi Pancasila sesuai yang terkandung dalam UUD 1945 sehingga diharapkan dapat mewujudkan masyarakat Kota Sawahlunto yang rukun, damai, demokratis, berkeadilan, sejahtera, maju dan memiliki moral dan etika dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi yang dimiliki serta tujuan program, selanjutnya isu strategis sebagai berikut berdasarkan isu strategis nasional :

a. Dukungan Penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024

Pemilu Presiden dan Legislatif akan dilaksanakan pada bulan Februari 2024 dan Pilkada Walikota Sawahlunto akan dilaksanakan pada bulan November 2024. Sesuai dengan tugasnya Kesbangpol Kota Sawahlunto melaksanakan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika politik, budaya politik, peningkatan demokrasi fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik daerah, maka berdasarkan hal ini Kesbangpol Kota Sawahlunto telah melakukan pemetaan dan persiapan untuk menghadapi tahapan ini. Kesbangpol Kota Sawahlunto juga telah memulai pemetaan untuk persiapan dan pencegahan antisipasi terjadinya konflik dengan melakukan koordinasi dengan instansi vertikal dalam pencegahan terjadinya konflik sosial.

b. Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila

Dinamika dalam mengaktualisasikan nilai Pancasila ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah suatu keniscayaan, agar Pancasila tetap selalu relevan dalam fungsinya memberikan pedoman bagi pengambilan kebijaksanaan dan pemecahan masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Agar loyalitas warga masyarakat dan warganegara terhadap Pancasila tetap tinggi. Di lain pihak, apatisme dan resistensi terhadap Pancasila bisa diminimalisir. Substansi dari adanya dinamika dalam aktualisasi nilai Pancasila dalam kehidupan praksis adalah selalu terjadinya perubahan dan pembaharuan dalam mentransformasikan nilai Pancasila ke dalam norma dan praktik hidup dengan menjaga konsistensi, relevansi, dan kontekstualisasinya. Sedangkan perubahan dan pembaharuan yang berkesinambungan terjadi apabila ada dinamika internal (*self-renewal*) dan penyerapan terhadap nilai-nilai asing yang relevan untuk pengembangan dan pengayaan ideologi Pancasila. Muara dari semua upaya perubahan dan pembaharuan dalam mengaktualisasikan nilai Pancasila adalah terjaganya akseptabilitas dan kredibilitas Pancasila oleh warganegara dan wargamasyarakat.

c. Penguatan Wawasan Kebangsaan (Pembangunan persatuan dan kesatuan masyarakat Kota Sawahlunto). Harmonisasi keragaman budaya, agama, suku, ras dan tradisi menjadi aspek penting dalam membangun karena adanya aspek kemajemukan didalam masyarakat.

Potensi terganggunya keamanan disebabkan oleh kondisi sosial, ekonomi dan budaya serta potensi kerawanan sosial, berkembangnya paham radikalisme/terorisme, SARA, dan mengikisnya pemahaman wawasan kebangsaan. Potensi konflik yang banyak terjadi akan meresahkan dan berakibat pudarnya rasa aman di masyarakat. Terjaminnya ketentraman dan ketertiban akan menciptakan rasa aman bagi masyarakat, merupakan jaminan bagi terlaksananya pembangunan. Sebagai bentuk pembinaan ideologi Pancasila, Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) yang mempunyai fungsi dalam membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melakukan koordinasi, sosialisasi dan sinkronisasi dalam pengendalian pembinaan ideologi Pancasila di daerah. Pembinaan ideologi Pancasila ini merupakan bentuk penerapan demokrasi Pancasila dan pengembangan wawasan kebangsaan di daerah.

- d. Penguatan Etika dan Budaya Politik (Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat Kota Sawahlunto)
Terwujudnya suasana partisipasi politik masyarakat yang tinggi dalam iklim yang demokratis yang terbebas dari berbagai macam gangguan keamanan dan kondusif menjadi modal dasar dalam keberhasilan pembangunan.
- e. Pengawasan Orang asing, Tenaga Kerja Asing, Ormas dan NGO Asing (Pemberdayaan Masyarakat).
Pemerintah perlu meningkatkan pemberdayaan masyarakat di dalam membangun kewaspadaan dan pembauran di masyarakat dalam menjaga stabilitas dan kondusifitas Kota Sawahlunto.

Perumusan Isu-Isu Strategis Badan Kesbangpol

No	ASPEK	ISU STRATEGIS
1	Potensi Konflik	Dukungan Penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024
		Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila
		Penguatan Wawasan Kebangsaan
		Penguatan Etika dan Budaya Politik
		Pengawasan Orang asing, Tenaga Kerja Asing, Ormas dan NGO Asing
2	Reformasi Birokrasi	Belum Optimalnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

- Mereview kembali faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Badan Kesbangpol lima tahun mendatang ditinjau dari:
- 1. Gambaran pelayanan Badan Kesbangpol.
Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat diketahui hampir keseluruhan target realisasi kegiatan di dalam Renstra pada periode sebelumnya (2013-2018) telah tercapai. Namun demikian tantangan pembangunan bidang Kesbangpol kedepan akan lebih dinamis sehingga Badan Kesbangpol harus dapat merumuskan strategi yang tepat dalam rangka menghadapi tantangan tersebut.

2. Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L

Dalam merumuskan Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto yang dituangkan dalam Dokumen Renstra, sudah seharusnya memiliki keterkaitan dengan visi dan misi Kementerian/Lembaga, maupun instansi yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto agar pelaksanaannya selalu dalam arah dan koridor yang benar. Telaahan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Rencana Strategis Badan Kesbangpol Kota Sawahlunto terhadap sasaran Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto terkait dengan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri khususnya Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.

Visi yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri periode 2020-2024 adalah **Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri**". Sedangkan misi yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri untuk mencapai visi tersebut adalah :

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Sebagai penjabaran dari pernyataan visi dan misi Kementerian Dalam Negeri tersebut, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri telah menetapkan tujuan yaitu : **"Terpeliharanya Stabilitas Politik Dalam Negeri dan Kesatuan Bangsa"** dengan mengacu pada Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. Berdasarkan Prioritas Nasional Nomor 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum menetapkan Prioritas Nasional sebagai berikut:
 - a. Penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) yang berkinerja tinggi;
 - b. Penguatan dan pemeliharaan kerukunan umat beragama;
 - c. Penguatan Gerakan Indonesia Bersatu dalam Kebinekaan
2. Berdasarkan Prioritas Nasional Nomor 7: Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum menetapkan 2 (dua) Prioritas Nasional sebagai berikut:
 - a. Penguatan lembaga demokrasi, yang dijabarkan dalam langkah-langkah sebagai berikut:
 - 1) Penyempurnaan Undang-Undang bidang Politik;
 - 2) Peningkatan bantuan keuangan partai politik;
 - 3) Penguatan demokrasi di daerah;

- 4) Pendidikan politik dan pendidikan pilih;
- 5) Peningkatan kualitas dan kapasitas ormas.
- b. Penanganan konflik sosial yang dijabarkan dalam langkah-langkah sebagai berikut:
 - 1) Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial;
 - 2) Deteksi dini oleh aparatur pusat dan daerah.

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri sebagai instansi tingkat Pusat dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto sebagai instansi tingkat daerah memiliki peran penting yang sama untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara, khususnya upaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa dalam memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk itu maka penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto diarahkan untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Propinsi.

Sedangkan dalam keterkaitannya dengan Propinsi, sudah seharusnya apabila Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 Kabupaten/Kota mengacu dan mendukung RPJMD Tahun 2021-2026. Sehingga dalam kerangka tugas dan fungsi Kesbangpol Kabupaten/Kota sejalan dengan tugas dan fungsi dari Kesbangpol Propinsi yang kedepan akan dijadikan acuan bagi Kesbangpol Kabupaten/Kota.

Tujuan Rencana Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 tersebut sepenuhnya mendukung tercapainya target Visi dan Misi Pemerintah Provinsi dan Nasional. Secara lebih terfokus, berikut disajikan tabel persandingan Tujuan Rencana Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 dengan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat dan Visi dan Misi Nasional Adapun keterkaitan antara misi Nasional, misi Provinsi Sumatera Barat dan Tujuan Kota Sawahlunto dan Badan Kesbangpol dapat dilihat pada Misi tabel dibawah ini:

Matriks keselarasan Visi dan Misi Nasional, Visi dan Misi Provinsi Sumatera Barat dengan Tujuan Pemerintah Kota Sawahlunto

NASIONAL 2020-2024		PROPINSI SUMATERA BARAT 2021-2026		TUJUAN KOTA SAWAHLUNTO 2024-2026	
VISI :TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAAN BERLANDASAN GOTONG ROYONG		VISI :TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT MADANI YANG UNGGUL DAN BERKELANJUTAN			
MISI 9	Sinergisitas Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan	MISI 7	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Bersih Akuntaibel Dan Berkualitas	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Melayani dan Inovatif	TUJUAN 4

3. Sasaran Jangka Menengah dari Renstra Perangkat Daerah Propinsi Sumatera Barat.

VISI : Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan			
Dengan Kebersamaan Kita Wujudkan Sawahlunto Sebagai Kota Wisata Yang Kreatif, Inovatif, Unggul, Bermatabat, Berkeadilan Dan Sejahtera			
MISI : Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah “Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah “.			
Menghadirkan Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Inovatif			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat (Sumbar)	A. Meningkatnya keamanan,ketentraman dan ketertiban masyarakat (Sumbar)	1. Melaksanakan deteksi dini dan cegah dini pada lapisan masyarakat	1.Peningkatan kewaspadaan nasional dan fasilitasi/upaya penanganan konflik sosial
		2. Penguatan Idiologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	2.Menumbuhkan semangat nasionalisme dan mensosialisasikan nilai -nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam masyarakat yang multi kultur
		3. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Sosial Budaya	3.Melaksanakan pembekalan bagi aparatur dan masyarakat terkait Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan penyakit masyarakat lainnya
		4. Terwujudnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK	4.Meningkatnya kehidupan harmoni, gotong royong, menjunjung nilai-nilai kebersamaan di tengah-tengah masyarakat
Menguatkan Karakter Kebangsaan dan Politik Kota Sawahlunto	Meningkatnya Antisipasi terjadinya Konflik untuk menciptakan kerukunan dan Ketertiban masyarakat di Kota Sawahlunto	1. Meningkatkan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.Merumuskan Kebijakan Teknis dan Memantapkan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Sesuai dengan Tatakala./aturan

		2. Meningkatkan Kualitas Kewaspadaan Nasional dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	2. Merumuskan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik Koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan aparat keamanan, Forum- forum (FKUB, FKDM, FPK), instansi terkait dalam penanganan masalah strategis dan konflik di daerah
		3. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	3. Melaksanakan Kebijakan di Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya sesuai dengan Tatakalat/Aturan
	B. Meningkatkan kualitas demokrasi di Sumatera Barat	5. Peningkatan Peran Partai Politik dan Pengembangan Etika, Budaya Berpolitik	6. Melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat dan pengurus partai politik
	Optimalisasi Penanganan Potensi Konflik di Kota Sawahlunto	1. Meningkatkan Peran partai politik dan lembaga pendidikan politik, serta etika budaya politik masyarakat	1. Merumuskan Kebijakan Teknis di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Sesuai dengan Tatakalat/aturan
		2. Meningkatkan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	2. Merumuskan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan sesuai dengan Tatakalat/Aturan
Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani (Sumbar)	C. Meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi	6. Peningkatan kualitas implementasi SAKIP di lingkungan internal perangkat daerah	1. Melaksanakan sosialisasi dan melakukan monitoring evaluasi terhadap implementasi SAKIP perangkat daerah secara berkala
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas (Kota Sawahlunto)	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	1. Mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	1. Kebijakan Komintmen dalam pelaksanaan perencanaan dalam pengambil keputusan

			2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan Pelaporan organisasi
		2. Meningkatkan pengawasan internal organisasi	3. Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pengawasan internal organisasi
		3. Meningkatkan pengawasan internal organisasi	4. Memperhitungkan waktu operasinal perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah

4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pedoman Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang menjadi pedoman pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara. Sedangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (yang selanjutnya disebut KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program (Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang PPLH Pasal 1 angka 10).

RTRW merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku, untuk itu RTRW harus dijadikan acuan pembangunan.

5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah

Dokumen pembangunan yang wajib dikaji melalui KLHS adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis (Renstra) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota dan kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup (UU PPLH Pasal 15 Ayat 2).

Berdasarkan Pasal 15 Ayat 1 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program." Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang wajib melaksanakan KLHS sesuai dengan UU PPLH pasal 15 ayat 2 huruf b adalah "Kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup."

Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto berdasarkan telaah, tidak akan berpotensi dan menimbulkan dampak dan atau resiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pasal 16 UU nomor 32 Tahun 2009 tentang muatan KLHS. Sehingga perwujudan dan implementasi KLHS dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto dapat sejalan tanpa ada implikasi yang signifikan diantara keduanya. Program kegiatan yang dilaksanakan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto diarahkan pada Pendidikan Politik, Wawasan Kebangsaan, Pancasila, Kondusifitas Wilayah dan Ekonomi Kerakyatan yang sejalan dengan muatan KLHS.

Substansi Bidang Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkaitan dengan pelayanan pemerintahan yang bersifat non fisik, yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang kesatuan bangsa, politik yang meliputi ketatausahaan, kesiagaan dan penanggulangan, hubungan dan penguatan kelembagaan ormas, porpol, demokratisasi dan kajian masalah-masalah aktual serta kesatuan bangsa dan pemberdayaan kelompok komunitas sosial dan forum-forum pendukung lainnya untuk meningkatkan perlindungan dan rasa persatuan dan kesatuan bangsa serta menjamin kesadaran politik masyarakat yang demokratis di daerah.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Dan Sasaran Renstra Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024-2026

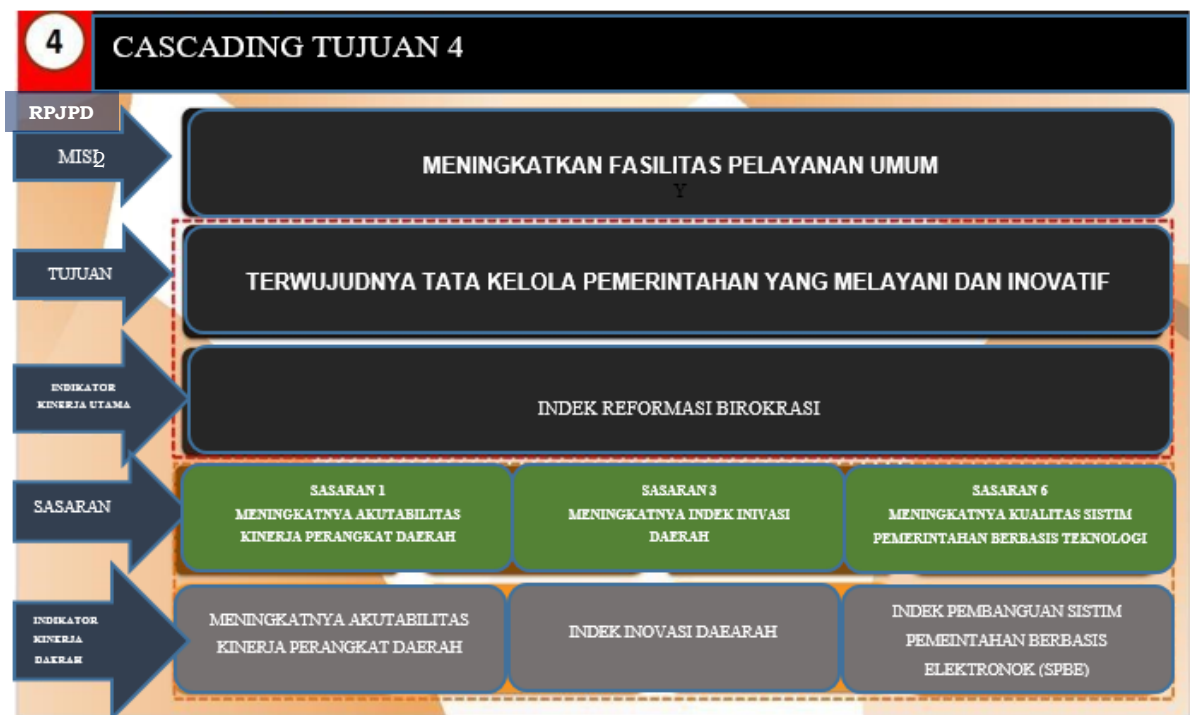
Dalam rangka terwujudnya perencanaan yang terintegrasi, maka Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) harus mengacu pada Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Sasaran Pj Kepala Daerah serta menerjemahkan Sasaran (IKD) yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sawahlunto Periode 2024-2026. Hal tersebut dikarenakan Sasaran RPD merupakan hasil yang diharapkan oleh Pj. Kepala Daerah. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan merujuk pada dokumen RPD, maka Tujuan yang dapat didukung secara langsung yakni tujuan 4 “***Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang melayani dan inovatif***”, Fokus tujuan ke empat adalah Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang berkualitas. Representasi tercapainya Akutabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Sebagai upaya untuk mencapai Tujuan 4, Pemahaman mengenai kerangka kinerja pembangunan Tujuan 4 RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 yang menguraikan mulai dari Tujuan, Indikator Tujuan (IKU), Sasaran, dan Indikator Sasaran (IKD), dapat dengan mudah dipahami melalui Pohon Kinerja/desain cascading yang disajikan sebagai berikut:

ESELON II	MENINGKATNYA TATAKELOLA PEMERINTAHAN YANG BERKUALITAS IK : NILAI SAKIP			
TUJUAN 1 Kinerja Strategis Daerah (ultimete Outcome)				
SASARAN 1 Kinerja Urusan Daerah (Intermediate Outcome)	MENINGKATNYA AKUTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH IK :NILAI SAKIP BAKESBANGPOL			
ESELON III	Meningkatnya Presentase Dokumen Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Kinerja Sub Urusan Daerah (Intermediate Outcome)	IK : Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
ESELON IV	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya SDM Aparatur IK : Persentase Aparatur Yang Meningkat SDM nya	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	IK : Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Yang di Susun	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	IK : Jumlah Barang Milik Daerah Yang diadakan	IK : Terpeliharanya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kinerja Tectical (Immediate Outcome)	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Terfasilitasnya Gaji dan Tunjangan ASN	IK : Terfasilitasnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terfasilitasnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	IK : Gaji dan Tunjangan ASN		IK : Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

ESELON II TUJUAN 2 Kinerja Strategis Daerah (ultimete Outcome) SASARAN 2 Kinerja Urusan Daerah (Intermediate Outcome)	MENGUATNYA KARAKTER KEBANGSAAN DAN POLITIK DIKOTA SAWAHLUNTO IK : INDEK KETAHANAN NASIONAL		
	OPTIMALISASI PENANGANAN POTENSI KONFLIK POLITIK IK :PRESENTASI PENYELESAIAN POTENSI KONFLIK POLITIK		
	Meningkatnya Peren Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik, serta Etika Budaya Politik Masyarakat IK : <ul style="list-style-type: none"> Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pemilu (%) Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah (%) Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengawasan Pengorganisasian Kemasyarakatan IK : <ul style="list-style-type: none"> Persentase Organisasi Masyarakat Yang Terdaftar dan Aktif di Kota Sawahlunto 	
ESELON IV	Meningkatnya Pemahaman dan Peran Parpol Tentang Pelaksanaan Pertanggung Jawaban	Terdaftarnya Keberadaan Ormas Terkait Legalitan dan Kegiatannya	
Kinerja Tectical (Immediate Outcome)	IK : <ul style="list-style-type: none"> Persentase Anggota Parpol Yang Mengikuti BinteK Pertanggungjawaban Parpol 	IK : <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Laporan Monitoring Ormas 	
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	

SASARAN 3 Kinerja Urusan Daerah (Intermediate Outcome)	MENINGKATNYA ANTISIPASI TERJADINYA KONFLIK UNTUK MENCIPTAKAN KERUKUNAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT IK :PRESENTASE PENYELESAIAN POTENSI KONFLIK SOSIAL		
	Meningkatnya Penguatan Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter IK : <ul style="list-style-type: none"> Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 	Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya IK : <ul style="list-style-type: none"> Persentase Fasilitasi Forum Umat Beragama Desa Bersinar Yang Terbentuk 	Meningkatnya Penyelesaian Potensi Konflik IK : <ul style="list-style-type: none"> Persentase Gejala Konflik Yang Dapat di Selesaikan Penyelesaian Potensi Konflim yang Dapat Teredam Persentase Pelaksanaan Pembinaan Terpadu Melalui Forum Strategis
	Meningkatnya Pemahaman Wawasan Kebangsaan Masyarakat	Meningkatnya Kapasitas Kerukunan Umat Beragama	Terfasilitasi Penanganan Percepatan Konflik Sosial
ESELON IV	IK : <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Masyarakat Yang Mengikuti Kegiatan Wasbang 	IK : <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Kegiatan Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya 	IK : <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Kegiatan FKDM Pengawasan Orang Asing dan Tim Terpadu Penanganan
Kinerja Tectical (Immediate Outcome)	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

GAMBAR
POHON KINERJA TAHUN 2024-2026



GAMBAR 4.2
CASCADING TUJUAN 4 PADA RPD TAHUN 2024-2026

Dalam penetapan tujuan perangkat daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah memperhatikan dan mengacu pada cascading Tujuan 4 RPD di atas. Adapun Sasaran RPD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yakni “***Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang melayani dan inovatif***” dengan indikator Indek Reformasi Birokrasi. Sehingga tujuan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto adalah “Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Berkualitas.

Setelah menetapkan tujuan maka perlu untuk menetapkan Sasaran. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi PD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Agar bisa mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik, dan terukur dalam waktu tahunan maka sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Akutabilitas Kinerja Perangkat Daerah
2. Optimalisasi Penanganan Potensi Konflik Politik
3. Meningkatnya Antisipasi Terjadinya Konflik untuk Menciptakan Kerukunan dan Ketertiban Masyarakat

Adapun *logical framework* tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat pada gambar berikut:



GAMBAR 4.3
TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN 2024-2026

Selanjutnya, untuk pemahaman mengenai hubungan dan kerangka kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026, dapat dengan mudah dipahami melalui desain *cascading* yang disajikan sebagai berikut:

PEMKO	TUJUAN RPD	TERWUJUDNYA TATAKELOLA PEMERINTAHAN YANG MELAYANI DAN INOVATIF		
	INDIKATOR	INDEK REFORMASI BIROKRASI		
	SASARAN RPD	MENINGKATNYA TATAKELOLA PEMERINTAHAN YANG BERKUALITAS		
KINERJA STRATEGIS DAERAH (ULTIMATE OUTCOME)	INDIKATOR	NILAI SAKIP (IKU)		
	TUJUAN PD	MENINGKATNYA TATAKELOLA PEMERINTAHAN YANG BERKUALITAS	MENGUATNYA KARAKTER KEBANGSAAN DAN POLITIK DI KOTA SAWAHLUNTO	
	INDIKATOR	NILAI SAKIP	INDEK KETAHANAN NASIONAL (IKU)	
KINERJA URUSAN DAERAH (INTERMATE OUTCOME)	SASARAN PD	MENINGKATNYA AKUTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH	OPTIMALISASI PENANGANAN POTENSI KONFLIK POLITIK	MENINGKATNYA ANTISIPASI TERJADINYA KONFLIK UNTUK MENCIPTAKAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
	INDIKATOR	NILAI SAKIP BAKESBANGPOL	PERSENTASE PENYELESAIAN POTENSI KONFLIK POLITIK (IKU)	PERSENTASE PENYELESAIAN POTENSI KONFLIK SOSIAL (IKU)

GAMBAR 4.4
CASCADING RENSTRA BAKESBANGPOL TAHUN 2024-2026

Adapun Keselarasan Sasaran dan Indikator Sasaran, Program dan Indikator Program, Kegiatan serta penanggung jawab pelaksanaan capaian kinerja pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024-2026 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

KINERJA URUSAN DAERAH (INTERMATE OUTCOME)	SASARAN PD	MENINGKATNYA AKUTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH	OPTIMALISASI PENANGANAN POTENSI KONFLIK POLITIK		MENINGKATNYA ANTISIPASI TERJADINYA KONFLIK UNTUK MENCIPTAKAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT		
	INDIKATOR	NILAI SAKIP BAKESBANGPOL	PERSENTASE PENYELESAIAN POTENSI KONFLIK POLITIK (IKU)		PERSENTASE PENYELESAIAN POTENSI KONFLIK SOSIAL (IKU)		
KINERJA SUB URUSAN (INTERMATE OUTCOME)	PROGRAM	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
	INDIKATOR	1. Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pemilu (%) 2. Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah (%) 3. Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (%)	Persentase Organisasi Masyarakat Yang Terdaftar dan Aktif di Kota Sawahlunto	1. Desa Bersinar Yang di Bentuk 2. Persentasi Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama	Persentasi Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.Persentasi Gejala Konflik Sosial Yang Dapat di Selesaikam 2.Persentase Potensi Konflik Yang Dapat Terdam 3.Persentase Pelaksanaan Pembinaan Terpadu Melalui Forun Strategis
KINERJA TECTICAL (IMEDIATE OUTCOME)	KEGIATAN	1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

GAMBAR 4.6 KESELARASAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA RENSTRA BAKESBANGPOL TAHUN 2024-2026

Adapun Keselarasan Sasaran dan Indikator Sasaran,Kegiatan dan Indikator Kegiatan, Sub Kegiatan serta penanggung jawab pelaksanaan capaian kinerja pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024-2026 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

KINERJA TECTICAL (IMEDIATE OUTCOME)	KEGIATAN	<div>1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</div> <div>2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</div> <div>3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</div> <div>4. Administrasi Umum Perangkat Daerah</div> <div>5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah</div> <div>6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</div> <div>7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</div>	<div>Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</div>	<div>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</div>	<div>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</div>	<div>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</div>	<div>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</div>
	INDIKATOR	<div>1. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Yang di Susun</div> <div>2. Gaji dan Tunjangan ASN Lainnya</div> <div>3. Persentase Aparatur Yang Meningkatkan SDMnya</div> <div>4. Terfasilitasinya Pelayanan Administrasi Umum (%)</div> <div>5. Jumlah Barang Milik Daerah Yang diadakan</div> <div>6. Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)</div> <div>7. Terpeliharanya Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah</div>	<div>Persentase Anggota Parpol Yang Mengikuti Bintek Pertanggungjawaban Parpol</div>	<div>Jumlah Laporan Monitoring Ormas</div>	<div>Jumlah Kegiatan Pemantapan Bidang ketahanan Ekonomi Sosial Budaya</div>	<div>Jumlah Masyarakat Yang Mengikuti Kegiatan Wasbang</div>	<div>Jumlah Kegiatan FKDM Pengawasan Orang asing dan Tim Terpadu Penanganan Konflik</div>

SUB KEGIATAN	<div>1. Penyusuna Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</div> <div>2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</div> <div>3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</div> <div>4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor</div> <div>5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</div> <div>6. Penyediaan Bahan Logistik Kantor</div> <div>7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan</div> <div>8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</div> <div>9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</div> <div>10. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</div> <div>11. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</div> <div>12. Jasa Surat Menyurat</div> <div>13. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik</div> <div>14. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Umum Kantor</div> <div>15. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</div> <div>16. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</div> <div>17. Pemeliharaan Mebel</div> <div>18. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lain</div> <div>19. Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</div> <div>20. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</div>	<div>1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</div> <div>2. Pelaksanaa Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</div> <div>3. Pelaksanaa Monitoring dan Evaluasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</div>	<div>1. Pelaksanaan Monitoring dan pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sangketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</div>	<div>1. Penyusunan Program Kerja Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan Daerah</div> <div>2. Pelaksanaan Koordinasi Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan Daerah</div>	<div>1. Penyusunan Program Kerja Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</div> <div>2. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</div> <div>3. Pelaksanaan Kebijakan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</div>	<div>1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik</div> <div>2. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab/Kota</div>
--------------	---	--	---	---	---	---

GAMBAR 4.7 KESELARASAN SASARAN KEGIATAN DAN SUB. KEGIATAN PADA RENSTRA 2024 - 2025

INDIKATOR	<div>1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</div> <div>2. Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</div> <div>3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</div> <div>4. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Paket)</div> <div>5. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan(Paket)</div> <div>6. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang di Sediakan (Paket)</div> <div>7. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang di Sediakan (Paket)</div> <div>8. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerUndang-undangan yang disediakan (Dokumen)</div> <div>9. Jumlah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)</div> <div>10. Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</div> <div>11. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan</div> <div>12. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)</div> <div>13. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)</div> <div>14. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)</div> <div>15. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang di pelihara dan dibayar pajaknya</div> <div>16. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan yang dipelihara dan dibayar pajaknya</div> <div>17. Jumlah Mebel yang dipelihara</div> <div>18. Jumlah Peralatan Mesin Lainnya yang dipelihara</div> <div>19. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)</div> <div>20. Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</div>	<div>1. Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun</div> <div>2. Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</div> <div>3. Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</div>	<div>1. Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</div>	<div>1. Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)</div> <div>2. Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</div> <div>3. Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</div>	<div>1. Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun</div> <div>2. Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang disusun</div> <div>3. Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di BidangIdeologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (orang)</div>	<div>1. Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</div> <div>2. Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)</div>
-----------	---	--	--	--	--	--

Untuk program Paskibraka sudah di mulai dari tahun 2023 di Bakesbangpol Kota Sawahlunto berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Perpres No. 51/2022) telah mengamanatkan kepada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai koordinator penyelenggaraan program Paskibraka secara nasional. Untuk pelaksanaan program Paskibraka di Kab/Kota berada di bawah koordinasi Badan melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Kegiatan Paskibraka merupakan program kaderisasi calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila yang dilaksanakan melalui pembinaan kepemimpinan, keterampilan, dan kedisiplinan yang menjunjung nilai kebangsaan, cinta tanah air, persatuan dan kesatuan, dan peningkatan wawasan kebangsaan kepada putra dan putri terbaik bangsa, sehingga pelaksanaan kegiatan Paskibraka berada di program Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

Keterkaitan atau linieritas tujuan dan sasaran jangka menengah disertai dengan indikator kinerja dan target kinerja selama 3 tahun pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Pelayanan
Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024-2026

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET TAHUN			
(1)	(2)	(3)	(4)	2024	2025	2026	KONDISI AKHIR RENSTRA
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Nilai SAKIP	62,19	62,50	62,81	62,81
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Badan Kesbangpol	B	B	BB	BB
2	Menguatnya karakter kebangsaan dan politik		Indek Ketahanan Nasional	2,89	2,90	2,91	2,91
		Meningkatnya Antisipasi terjadinya Konflik untuk mencitptakan kerukunan dan Ketertiban masyarakat di Kota Sawahlunto	Persentase potensi penyelesaian konflik Sosial	100	100	100	100
		Optimalisasi Penanganan potensi konflik politik	Persentase penyelesaian potensi konflik politik	100	100	100	100

TABEL 4.2
PENYELARASAN TUJUAN DAN SASARAN, DEFINISI OPERASIONAL, FORMULASI,
SUMBER DATA DAN PENETAPAN TARGET

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas	Nilai SAKIP Badan Kesbangpol	Nilai SAKIP	Hasil Penilaian SAKIP	CC	BB
Menguatnya karakter kebangsaan dan politik	Indek Ketahanan Nasional	Indek IPOLEKSOSBUD	Kondisi dinamis bangsa indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri langsung atau tidak langsung	N/A	2,91

SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI	DEFINISI OPERASINAL	SUMBER DATA	KONDISI AWAL	2024	2025	2026	KONDISI AKHIR
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Badan Kesbangpol	Nilai Evaluasi SAKIP Inspektorat	Indikator ini Hasil Nilai SAKIP dari Inspektorat	Renstra PD Renja LKjIP Renaksi	CC	B	B	BB	BB
Opitmalisasi Penanganan Potensi Konflik Politik	Persentase penyelesaian potensi konflik Politik	$\frac{\text{Jumlah Potensi Konflik Politik Yang Dapat Terselesaikan}}{\text{Jumlah Potensi Konflik Politik}} \times 100$	Indikator ini menghitung jumlah Konflik politik	Renstra PD Renja LKjIP Renaksi	N/A	100	100	100	BB
Meningkatnya antisipasi terjadinya konflik untuk menciptakan kerukunan dan ketertiban masyarakat	Persentase penyelesaian potensi konflik sosial	$\frac{\text{Jumlah Potensi Konflik Sosial Yang Dapat Terselesaikan}}{\text{Jumlah Potensi Konflik Sosial}} \times 100$	Indikator ini menghitung jumlah Konflik Sosial	Renstra PD Renja LKjIP Renaksi	N/A	100	100	100	BB

TABEL 4.3
PENYELARASAN PROGRAM, DEFINISI OPERASIONAL, FORMULASI, SUMBER DATA DAN PENETAPAN TARGET

PROGRAM	INDIKATOR	FORMULASI	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	KONDISI AWAL	2024	2025	2026	KONDISI AKHIR
Program Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahK abupaten /Kota	Urusan Pemerintahan Daerah yang Berjalan Lancar dan Tertib (%)	Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	Indikator ini mengukur tingkat Ketercapaian Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	Renstra PD Renja LKjIP	100	100	100	100	100
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	$\frac{\text{Jumlah Peserta Yang Meningkatkan Pemahamannya}}{\text{Jumlah Peserta}} \times 100$ %	Indikator ini menghitung jumlah Pserta Yang Paham mendapatkan pendidikan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Renstra PD Renja LKjIP	N/A	57	60	65	70
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilu (%)	$\frac{\text{Jumlah Masyarakat Yang Memilih Pada Pemilu}}{\text{Jumlah DPT}} \times 100 \%$	Indikator ini menghitung jumlah partisipasi masyarakat dalam mengikuti pesta demokrasi	KPU	86,26	86,26	86,26	86,26	86,26
	Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (%)	$\frac{\text{Jumlah Masyarakat Yang Memilih Pada Pilkada}}{\text{Jumlah DPT}} \times 100 \%$	Indikator ini menghitung jumlah partisipasi masyarakat dalam mengikuti pesta demokrasi	KPU	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5
	Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (%)	$\frac{\text{Jumlah Masyarakat Yang Memilih Pada Pilgub}}{\text{Jumlah DPT}} \times 100 \%$	Indikator ini menghitung jumlah partisipasi masyarakat dalam mengikuti pesta demokrasi	KPU	65,8	65,8	65,8	65,8	65,8

Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Organisasi Masyarakat Yang Terdaftar dan Aktif di Kota Sawahlunto	$\frac{\text{Jumlah Organisasi Yang Terdaftar dan Aktif}}{\text{Jumlah Organisasi Yang Terdata}} \times 100 \%$	Indikator ini mengukur jumlah ormas yang Terdaftar dan Aktif dalam organisasi Kemasyarakatan	Renstra PD Renja LKjIP Renaksi	N/A	100	100	100	100
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama	Pelaksanaan Forum Kerukunan Umat Beragama	Indikator ini menghitung jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Renstra PD Renja LKjIP Renaksi	100	100	100	100	100
	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Terpadu Melalui Forum Strategis	$\frac{\text{Jumlah Laporan Pembinaan Uang diTindak Lanjuti}}{\text{Jumlah Laporan}} \times 100 \%$	Indikator ini menghitung jumlah Laporan yang ditindaklanjuti dalam pelaksanaan Pembinaan	Renstra PD Renja LKjIP Renaksi	100	100	100	100	100
	Desa Bersinar Yang Terbentuk	Jumlah Desa Bersinar Yang Terbentuk	Indikator ini menghitung berapa Desa Bersinar yang terbentuk	Renstra PD Renja LKjIP Renaksi	1	1	1	1	1
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Gejala Konflik Sosial Yang Dapat d Selesaikan (%)	$\frac{\text{Jumlah Potensi Konflik Sosiak Yang Dapat terselesaikan}}{\text{Jumlah Potensi Konflik Sosial}} \times 100 \%$	Indikator ini menghitung jumlah Potensi Konflik yang dapat terselesaikan	Renstra PD Renja LKjIP Renaksi	N/A	100	100	100	100
	Persentase Potensi Konflik Yang Dapat Teredam (%)	$\frac{\text{Jumlah Potensi Konflik Sosiak Yang Dapat Teredam}}{\text{Jumlah Potensi Konflik}} \times 100 \%$	Indikator ini menghitung jumlah Potensi Konflik yang dapat terredam	Renstra PD Renja LKjIP Renaksi	N/A	100	100	100	100

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sebagai upaya efektivitas penyelenggaraan pembangunan agar lebih fokus dalam kerangka pencapaian indikator target tujuan dan sasaran Renstra Bakesbangpol Kota Sawahlunto, maka perlu dirumuskan strategi dan kebijakan Renstra Bakesbangpol Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026. Strategi dan kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Bakesbangpol, dalam mengemban tugas dan kewenangannya. Bakesbangpol harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan, dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh Aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi dan arah kebijakan yang tepat menjadi sangat penting.

Strategi dan arah kebijakan merupakan suatu respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dari seluruh kebijakan dan program kegiatan yang dirumuskan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Strategi dan arah kebijakan dalam pelaksanaan Rencana Strategis Bakesbangpol Kota Sawahlunto tahun 2024 – 2026. Untuk mencapai sasaran RPD yang dijabarkan dalam tujuan-tujuan dan sasaran- sasaran RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026, maka penting untuk membangun alternatif-alternatif strategi dan kebijakan Bakesbangpol. Alternatif- alternatif strategi dan kebijakan yang dibangun di dalam Renstra Bakesbangpol Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 menggunakan analisis yaitu SWOT digunakan untuk menemukan berbagai alternatif strategi yang mungkin dapat digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran,yang efektif dan efisien Berikut ini adalah analisis SWOT untuk menentukan strategi yang akan digunakan Bakesbangpol.

Analisis SWOT

	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
	Adanya Peraturan Walikota tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto. Adanya akses yang baik kepada Infra struktur politik dan supra struktur politik. Adanya Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah. Adanya bentuk jejaring sebagai wadah koordinasi lintas sectoral. Urusan kesatuan bangsa dan politik merupakan urusan strategis, sebagai syarat dasar pembangunan dapat berjalan Adanya sumber daya manusia dan komitmen dari aparaturnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk melaksanakan program kegiatan secara optimal. Adanya dana dan dukungan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk melaksanakan program-program pemerintah daerah khususnya program dan kegiatan yang menyangkut bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. Adanya sarana dan prasarana yang cukup	Sumber daya manusia yang ada belum sebanding dengan beban tugas Terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan kegiatan PD Terbatasnya dana yang tersedia di dalam pelaksanaan kegiatan sehingga tidak bisa dilaksanakan secara maksimal.

ISU STRATEGIS

Peluang (O)	<p>Stabilitas daerah yang cukup kondusif.</p> <p>Banyaknya organisasi di masyarakat</p> <p>Kerjasama yang baik antar instansi vertical.</p> <p>Tersedianya pedoman untuk acuan.</p> <p>Kebutuhan masyarakat terhadap peran Pemerintah dalam pemberdayaan infra dan supra struktur politik, penguatan ideologi dan wawasan kebangsaan, serta peningkatan kualitas Demokrasi masih sangat besar.</p> <p>Jaringan informasi terutama dalam hal pencegahan dan penanganan konflik sosial sangat membutuhkan peran pemerintah daerah.</p> <p>Isu permasalahan strategis yang dirumuskan Bakesbangpol sebagian besar merupakan isu nasional yang menjadi fokus dan perhatian berbagai pihak</p>	<p><u>STRATEGI OFENSIF (S-O)</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Optimalkan Peraturan Walikota dan Daerah tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok,Pembentukan jejaring sebagai wadah Koordinasi lintas sectoral untuk mengatasi Isu permasalahan strategis dengan Kerjasama yang baik antar instansi vertical. (S1, S2, S3,S4,O7,O3)2. Optimalkan Urusan kesatuan bangsa dan politik dengan organisasi/tokoh masyarakat untuk menjaga stabilitas daerah yang kondusif (S4,O2,O1)3. Optimalisasikan dana dan dukungan Anggaran Pemerintah Daerah dan program-program dengan memaksimalkan kebutuhan masyarakat melalui pemberdayaan infra dan supra struktur politik untuk penguatan ideologi dan wawasan kebangsaan (W8, O5)	<p><u>STRATEGI PERKUATAN/KONSOLIDASI (W-O)</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Atasi Sumber daya manusia yang ada belum sebanding dengan beban tugas dengan Jaringan informasi dalam hal penecegahan dan penanganan konflik sosial sangat membutuhkan Peran Pemerintah,Kerja sama yang baik antar instansi Vertikal (W1,O6,O3)2. Atasi terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan kegiatan dengan organisasi/tokoh masyarakat, melalui peran Pemerintah dalam pemberdayaan infra dan supra struktur politik, penguatan ideologi dan wawasan kebangsaan, serta peningkatan kualitas Demokrasi masih sangat besar.(W2,O2,O5)3. Atasi terbatasnya dana yang tersedia sehingga pelaksanaan kegiatan tidak maksimal dengan Isu permasalahan strategis yang dirumuskan denga adanya Pedoman dan acuan (W3,O7,O4)
Ancaman (T)	<p>Adanya potensi terjadinya konflik</p> <p>Mobilitas sumber daya manusia cukup tinggi.</p> <p>Alih fungsi sarana dan prasarana yang ada</p> <p>Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi urusan kesatuan bangsa dan politik.</p> <p>Kondisi masyarakat saat ini dalam era teknologi informasi membuat sangat dinamis, sehingga potensi konflik lebih sulit untuk diprediksi</p>	<p><u>STRATEGI DIVERSIFIKASIKAN (S-T)</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Optimalkan Peraturan Walikota dan Daerah tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok, Pembentukan jejaring sebagai wadah Koordinasi lintas sectoral dengan adanya perubahan kebijakan untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan (S1,S2,S3,S4T4)2. Optimalkan Urusan kesatuan bangsa dan politik dengan perkembangani era teknologi untuk mengatasi potensi konflik yang sulit di prediksi (S4,S5)3. Optimalisasikan dana dan dukungan Anggaran Pemerintah Daerah dan program-program untuk mengatasi Konflik (S8,T1)	<p><u>STRATEGI DIPERTAHANKAN (T-W)</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Atasi Sumber daya manusia yang ada belum sebanding dengan beban tugas untuk menghindari terjadinya Konlik dengan sumber daya manusia yang cukup (W1,T1,T2)2. Atasi terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan kegiatan serta mengatasi pengaruh negatif IPTEK globalisasi potensi konflik yang sulit di prediksi (W2,T5)3. Atasi terbatasnya dana yang tersedia sehingga pelaksanaan kegiatan tidak maksimal dengan memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi urusan kesatuan bangsa dan politik dalam pengambilan kebijakan serta mrnhindari terjadinya potensi konflik (W3,T4,T5)

Beberapa strategi yang diperoleh dari hasil analisis SWOT tersebut di atas, selanjutnya dipetakan yang menjelaskan juga tentang kebijakan dan program yang akan dilaksanakan berdasarkan strategi-strategi yang telah dipilih. Pemetaan dengan menghasilkan 8 (delapan) Arah kebijakan,yang merupakan jembatan antara strategi dengan 6 (enam) program, yang selanjutnya dirinci menjadi kegiatan-kegiatan. Pemetaan sebagaimana dimaksud dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Analisis Pemetaan Strategi Bakesbangpol

No	Perspektif	Strategi 1	Mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya	
		Strategi 2	Meningkatkan pengawasan internal organisasi	
		Strategi 3	Meningkatkan pengawasan internal daerah	
		Strategi 9	Peningkatan tata kelola dan kualitas pelayanan perangkat daerah	
			Kebijakan	Program
1	Perspektif Masyarakat		Program/Kegiatan terlaksana	-
2	Perspektif Proses Internal		Kebijakan dan Komintmen dalam pelaksanaan perencanaan dalam pengambil keputusan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
			Meningkatkan kualitas perencanaan dan Pelaporan organisasi	
			Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pengawasan internal organisasi	
			Memperhitungkan waktu operasinal perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	
3	Perspektif Kelembagaan		Perangkat Daerah	
4	Perspektif Keuangan		Rp.16.946.899.400,- (Enam belas miliar sembilan ratus empat puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah)	
No	Perspektif	Strategi 4	Meningkatkan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
			Kebijakan	Program
1	Perspektif Masyarakat		Pemahaman makna persatuan, pentingnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa serta pembauran antar masyarakat	-
2	Perspektif Proses Internal		Merumuskan Kebijakan Teknis dan Memantapkan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Sesuai dengan Tatakala/aturan	PROGRAM PENGUATAN IDIOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
3	Perspektif Kelembagaan		Perangkat Daerah	
4	Perspektif Keuangan		Rp.1.200.000.000,- (Satu miliar dua ratus juta rupiah)	-
No	Perspektif	Strategi 5	Meningkatkan Kualitas Kewaspadaan Nasional dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	
			Kebijakan	Program
1	Perspektif Masyarakat		Sinergitas Muspida dengan stakeholder untuk kewaspadaan dinia dan antisipasi konflik sosial.	-
2	Perspektif Proses Internal		Merumuskan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik Koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan aparat keamanan, Forum- forum (FKUB, FKDM, FPK), instansi terkait dalam penanganan masalah strategis dan konflik di daerah	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
3	Perspektif Kelembagaan		Muspida , Stakeholder	
4	Perspektif Keuangan		Rp. 2.700.000.000,- (Dua miliar tujuh ratus juta rupiah)	-

No	Perspektif	Strategi 6	Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	
			Kebijakan	Program
1	Perspektif Masyarakat		Peran LSM/Ormas dalam mendukung kerukunan hidup umat beragama	-
2	Perspektif Proses Internal		Melaksanakan Kebijakan di Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya sesuai dengan Tatakala/Aturan-	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA
3	Perspektif Kelembagaan		Perangkat Daerah	
4	Perspektif Keuangan		Rp. 2.550.000.000,- (Dua miliar lima ratus lima puluh juta rupiah)	-
No	Perspektif	Strategi 7	Meningkatkan Peran partai politik dan lembaga pendidikan politik, serta etika budaya politik masyarakat	
			Kebijakan	Program
1	Perspektif Masyarakat		Partisipasi pemilih dalam Pemilu Presiden (Pilpres), Pemilu Legislatif (Pileg), Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)	
2	Perspektif Proses Internal		Merumuskan Kebijakan Teknis di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Sesuai dengan Tatakala/aturan	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA DAN BUDAYA
3	Perspektif Kelembagaan		Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, KPU Bawaslu,Polri	
4	Perspektif Keuangan		Rp. 3.214.799.000,- Tiga miliar dua ratus empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)	
No	Perspektif	Strategi 8	Meningkatkan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	
			Arah kebijakan	Program
1	Perspektif Masyarakat		Peran LSM/Ormas	-
2	Perspektif Proses Internal		Merumuskan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan sesuai dengan Tatakala/Aturan	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
3	Perspektif Kelembagaan		LSM/Ormas	
4	Perspektif Keuangan		Rp. 145.000.000,- (Seratus empat puluh lima rupiah)	

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tujuan 4 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang melayani dan inovatif				
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas	1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1 Mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	1 Kebijakan dan Komintmen dalam pelaksanaan perencanaan dalam pengambil keputusan
				2 Meningkatkan kualitas perencanaan dan Pelaporan organisasi
			2 Meningkatkan pengawasan internal organisasi	1 Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pengawasan internal organisasi
			3 Meningkatkan rencana dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Memperhitungkan waktu operasinal perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah
2	Menguatnya karakter kebangsaan dan politik di Kota Sawahlunto	1 Meningkatkan antisipasi terjadinya konflik untuk menciptakan kerukunan dan ketertiban masyarakat di Sawahlunto	1 Meningkatkan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1 Merumuskan Kebijakan Teknis dan Memantapkan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Sesuai dengan Tatakala./aturan
			1 Meningfkatkan Kualitas Kewaspadaan Nasional dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	1 Merumuskan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik Koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan aparat keamanan, Forum- forum (FKUB, FKDM, FPK), instansi terkait dalam penanganan masalah strategis dan konflik di daerah
			2 Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	1 Melaksanakan Kebijakan di Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya sesuai dengan Tatakala/Aturan

		3	Optimalisasi Penanganan Potensi Konflik Politik di Kota Sawahlunto	1	Meningkatkan Peran partai politik dan lembaga pendidikan politik, serta etika budaya politik masyarakat	1	Merumuskan Kebijakan Teknis di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Sesuai dengan Tatakala/aturan
				2	Meningkatkan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	1	Merumuskan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan sesuai dengan Tatakala/Aturan

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program yang diakomodir dalam Renstra Organisasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto berjumlah 6 (enam) Program, 13 (belas) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) Sub kegiatan adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan Tahun 2024 – 2026
Kesbangpol Kota Sawahlunto

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Menguatnya karakter kebangsaan dan politik Kota Sawahlunto				Indek Ketahanan Nasional (IKU)	0	2.89	3.385.000.000	2.90	2.945.000.000	2.90	3.315.000.000	2,91	9.645.000.000	KESBANG POL	SWL
	Meningkatnya antisipasi terjadinya konflik untuk menciptakan kerukunan dan ketertiban masyarakat di Kota Sawahlunto			Persentase Penyelesaian Konflik Sosial di Kota Sawahlunto (IKU)	0	90	3.385.000.000	90	2.945.000.000	95	3.315.000.000	95	9.645.000.000	KESBANG	SWL
		8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDIOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	50	57	300.000.000	60	400.000.000	65	500.000.000	70	1.200.000.000		
		8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila	Jumlah Masyarakat yang mengikuti kegiatan Sosialisasi Wasbang (Orang)	90	120	300.000.000	120	400.000.000	120	500.000.000	120	1.200.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
			dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan terkait pemantapan Pelaksanaan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	0	1		1		1		3			
				Jumlah peringatan hari-hari besar yang difasilitasi (Kegiatan)	3	0		0		0		0			
				Jumlah Forum-forum strategis daerah (Forum)	3	0		0		0		0			
				Jumlah kegiatan Bidang ideologi wasbang dan bela negara (Kegiatan)	3	0		0		0		0			
		8.01.002.2.01.1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika	Jumlah Kegiatan Bidang Ideologi wasbang dan Bela Negara (Kegiatan)	2	0	-	0	-	0	-	0	-		
				Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	3	4	75.000.000	4	125.000.000	4	150.000.000	4	350.000.000		
		8.01.02.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kegiatan Bidang Ideologi wasbang dan Bela Negara, Karakter Kebangsaan,Bhinek a Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Kegiatan)	8	0		0		0		0			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
				Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang disusun	0	4	50..000.000	4	75.000.000	4	100.000.000	4	225.000.000		
		8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (orang)	0	orang	175.000.000	orang	200.000.000	orang	250.000.000	orang	625.000.000		
		8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Persentase Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama	0	100	750.000.000	100	350.000.000	100	950.000.000	100	2.550.000.000	KESBANG	SWL
				Desa Bersinar Yang Terbentuk	0	1		1		1		1			
				Persentase pelaksanaan pembinaan terpadu melalui forum strategis (%)	100	85		85		85					
				Fasilitasi Fasilitasi Kegiatan PAGN yang terlaksana	100	0	-	0	-	0	-				
		8.01.05.201	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Kegiatan Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya (Kegiatan)	3	2	750.000.000	2	350.000.000	2	950.000.000	2	2.212.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
				Persentase Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama yang terlaksana	100	100		100		100		100			
				Persentase Fasilitasi kegiatan P4GN yang terlaksana	100	100		100		100					
				Jumlah Masyarakat yang mengikuti Sosialisasi Pekat (orang)	90	0	-	0	-	0	-	0	-		
		8.01.05.201.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)	2	2	487.000.000	2	150.000.000	2	400.000.000	6	1.037..000.000		
		8.01.05.201.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Deteksi Dini P4GN - Pencegahan Dini P4GN	3	0		0		0		0			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
				Jumlah Kegiatan Terkait pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi , Sosial,Budaya dan Fasiliasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaani Daerah.	3	0		0		0		3			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	0	75	263.000.000	100	50.000.000	100	300.000.000	3	613.000.000		
		8.01.05.201.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan FasilitasiPe ncegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi yang Dilaksanakan (Bulan)	12	0	-	0	-	0	-	0	-		
				Koordinasi Kegiatan antar Umat Beragama (bulan)	12	0	-	0	-	0	-	0	-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
				Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	0	0	-	50	150.000.000	75	250.000.000	100	400.000.000		
		8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase gejala konflik sosial yang dapat diselesaikan	100	100	800.000.000	100	900.000.000	100	1.000.000.000	100	2.700.000.000	KESBANG	SWL
				Persentase gejala konflik sosial yang dapat teredam	-	100		100		100		100			
				Persentase pelaksanaan pembinaan terpadu melalui forum strategis	100	100		100		100		100			
				Persentase Rekomendasi Hasil Rapat yang ditindaklanjuti	100	0		0		0					
				Persentase Fasilitas Forum Kewaspadaan Dini	100	0	-	0	-	0	-				
		8.01.06.201	Perumusan Kebijakan Tehnis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional,dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Kegiatan FKDM, Pengawasan Orang Asing dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	12	12	800.000.000	12	900.000.000	12	1.000.000.000	12	2.700.000.000		
				Jumlah konflik sosial yang terjadi	0	0	-	0	-	0	-	0	-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
		8.01.06.201.01	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan pelaksanaan dini dan deteksi dini ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan	12	0	-	0	-	0	-	0	-		
			Jumlah pengawasan orang asing (POA)	12	0	-	0	-	0	-	0	-			
			Jumlah Rencana Aksi dan Laporan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (Dokumen)	12	0	-	0	-	0	-	0	-			
			Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12	12	200.000.000	12	150.000.000	12	200.000.000	12	550.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
		8.01.06.201.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Dokumen)	0	0	-	120	100.000.000	120	150.000.000	120	250.000.000		
			Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	12	600.000.000	12	650.000.000	12	650.000.000	36	1.900.000.000		
	Optimalisasi Penanganan Potensi Konflik Politik di Kota Sawahlunto			Persentase Penyelesai Potensi Konflik Politik di Kota Sawahlunto (IKU)	0	85	1.664.799.000	85	750.000.000	85	800.000.000	85	3..214.799.000	POLDAGRI	SWL
		8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA	Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilu (%)	78	86,25	1.500.000.000	0	750.000.000	0	800.000.000	86,25	3.050.000.000	POLDAGRI	SWL
				Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (%)	78,62	82,50		0		0		82,50			
				Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gunbernur (%)	54,27	65,80		0		0		65,80			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
		8.01.03.20.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah gangguan terhadap kegiatan PEMILU (kasus)	0	0		0		0		0			
			Persentase pemahaman masyarakat tentang etika dan budaya politik	100	0		0		0		100				
			Persentase anggota Parpol yang mengikuti Bimtek pertanggungjawab an Keuangan Parpol	0	5	1.500.000.000	3	750.000.000	1	800.000.000	9	3.050.000.000			
				Terlaksananya perumusan kebijakan teknis dan pemantapan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	0	0	-	0	-	0	-	0	-		
				Jumlah Parpol yang diberikan bantuan Keuangan (partai)	0	0	-	0	-	0	-	0	-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
		8.01.03.20.1.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	10	11	150.000.000	11	500.000.000	11	550.000.000	11	1.200.000.000		
		8.01.03.20.1.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	0	50 orang	1.085.000.000	0	-	0	-	50 orang	1.085.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
		8.01.03.20.1.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	0		164.799.000	0	-	0	-	0	164.799.00		
		8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase organisasi masyarakat yang terdaftar dan aktif di Kota Sawahlunto	0	100	35.000.000	100	45.000.000	100	65.000.000	100	145.000.000	POLDAGRI	SWL
		8.01.04.201	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah organisasi yang terdaftar	0	41	35.000.000	41	45.000.000	41	65.000.000	41	145.000.000		
		8.01.04.201.05	Pelaksanaan Monitoring evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendaftaran ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi sengketa ormas , pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	Jumlah organisasi yang aktif	0	0	-	0	-	0	-	0	-		
				Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	0	41	35.000.000	41	45.000.000	41	65.000.000	41	145.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas				Nilai SAKIP (IKU)	0	62,19	5.061.302.642	62,50	5.442.798.379	62,81	6.442.798.379.	62,81	16.946.899.400	SEKRETAR IAT	SWL
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Peragkat Daerah			Nialai SAKIP BADAN KESBANGPOL	0	73,45	5.061.302.642	73,45	5.442.798.379	73,45	6.442.798.379	73,45	16.946.899.400	SEKRETAR IAT	SWL
		1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang Berjalan Lancar dan Tertib (%)	100	100	5.061.302.642	100	5.442.798.379	100	6.442.798.379	100	16.946.899.400	SEKRETAR IAT	SWL
				Persentase Indikator Program yang Tercapai		95		95		95		95			
				Persentase Realisasi Anggaran		95		95		95		95			
		1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang Disusun	1	1	10.000.000	1	15.000.000	1	50.000.000	1	75.000.000		
		1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1	10.000.000	1	15.000.000	1	50.000.000	1	75.000.000		
		1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Gaji dan Tunjangan PNS Lainnya	14	17 org/ bln	2.730.982.578	17 org/ bln	3.122.792.315	17 org/ bln	3.622.786.251	17 org/ bln	9.476.561.144		
		1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	17 org/ bln	2.730.982.578	17 org/ bln	3.122.792.315	17 org/ bln	3.622.786.251	17 rg/ bln	9.476.561.144		
		1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap (%)	100	100	40.880.000	100	74.506,064	100	75.000.000	100	190.386.064		
				Persentase Aparatur yang meningkat SDM nya (%)	80	100	-	100	-	100	-	100	-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
		1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (paket)	1	0	-	0	-	0	-	0	-		
		1.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15	17	40.880.000	17	74.506.064	17	75.000.000	17	190.386.064		
		1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terfasilitasinya pelayanan administrasi umum (%)	100	100	406.018.000	100	406.500.000	100	496.000.000	100	1.308.518.000		
		1.05.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	1	4.827.600	1	8.000.000	1	12.000.000	1	24.827.600		
		1.05.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	3	81.840.400	3	65.000.000	3	85.000.000	3	191.840.400		
		1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	1	1	30.314.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	100.314.000		
		1.05.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	1	1	36.480.000	1	45.000.000	1	60.000.000	1	131.480.000		
		1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan perUndang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)	12	12	2.001.000	12	3.500.000	12	4.000.000	12	9.501.000		
		1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	120	50	250.555.000	50	250.000.000	50	300.000.000	50	775.555.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
		1.05.01.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	1	1	30.000.000	2	530.000.000	1	155.000.000	1	715.000.000		
					3	0		3		1					
		01.207.05	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	0	-	4	480.000.000	1	80.000.000		319.000.000		
		01.207.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	1	1	30.000.000	2	50.000.000	1	75.000.000	1	65.000.000		
		01.207.01	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (bulan)	12	12	1.720.308.064	12	1.077.000.000	12	1.827.000.000	12	4.624.308.064		
		1.05.01.2.08	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	1.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	5.000.000		
		1.05.01.2.08.01	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	74.975.064	12	75.000.000	12	75.000.000	12	224.975.064		
		1.05.01.2.08.02	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	14	14	1.644.333.000	14	1.000.000.000	14	1.750.000.000	14	1.804.333.000		
		1.05.01.2.08.04	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (bulan)	12	12	112.800.000	12	217.000.000	12	217.000.000	12	566.800.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
		1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang di pelihara dan dibayar pajaknya	12	12	100.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	300.000.000		
		1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	4	4.000.000	4	6.000.000	4	6.000.000	4	16.000.000		
		1.05.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara		5	5.800.000	5	6.000.000	5	6.000.000	5	17.800.000		
		1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Mesin Lainnya yang dipelihara		4	3.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	13.000.000		
		1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	1	0	-	1	15.000.000	1	20.000.000	1	35.000.000		
		1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Banguan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/direhabilitasi	1	0	-	10	35.000.000	10	30.000.000	10	65.000.000		

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagai wujud dari komitmen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto berperan dalam mencapai tujuan dan sasaran daerah melalui pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, maka disusun lah indikator kinerja untuk menunjukkan kinerja yang akan dicapai pada tahun 2024-2026. Indikator tersebut akan dituangkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Bakesbangpol Kota Sawahlunto
Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD

NO	INDIKATOR	KONDISI KERJA AWAL PERIODE	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KERJA AKHIR PERIODE
			2024	2025	2026	
1	<i>Nilai SAKIP Badan Kesbang (IKU)</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>BB</i>	<i>BB</i>
2	Urusan Pemerintahan Daerah yang Berjalan Lancar dan Tertib (%)	100	100	100	100	100
3	<i>Indeks Ketahanan Nasional (IKU)</i>	-	<i>2,89</i>	<i>2,90</i>	<i>2,91</i>	<i>2,91</i>
4	Persentase Gejala Konflik Sosial Yang dapat di selesaikan	-	100	100	100	100
5	Persentase potensi konflik yang dapat teredam (%)	-	100	100	100	100
6	<i>Persentase penyelesaian Potensi konflik Sosial (IKU)</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
7	Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	-	57	60	65	70
8	Persentase Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (%)	100	100	100	100	100
9	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Melalui Forum Strategis	100	100	100	100	100
10	Desa Bersinar Yang Terbentuk	1	1	1	1	1
11	<i>Persentase penyelesaian potensi konflik politik (IKU)</i>	-	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
12	Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilu (%)	86,26	86,25	-	-	86,25
13	Tingkat partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah (%)	82,5	82,5	-	-	82,5
14	Tingkat partisipasi pemilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (%)	65,8	65,8	-	-	65,8
15	Presentase Lembaga Yang Mendapatkan Pendidikan Politik	-	65	100	100	100
16	Persentase organisasi masyarakat yang terdaftar dan aktif di Kota Sawahlunto (%)	-	100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

8.1.Kesimpulan

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 adalah dokumen dan bagian dari rangkaian kegiatan pembangunan sebagai pedoman yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah guna mencapai misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Perangkat Daerah (RPD).

Kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran yang disusun dalam bentuk indikatif serta akan dijabarkan lebih lanjut kedalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan, selain merupakan jabaran dari Renstra Perangkat Daerah, juga mengacu pada RKPD sebagai penjabaran tahunan Rencana Pembangunan Perangkat Daerah (RPD).

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto sebagai salah satu faktor pendukung Rencana Pembangunan Perangkat Daerah (RPD). (2024-2026).

8.2.Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 disusun melalui berbagai tahapan yakni persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan diakhiri dengan penetapan setelah Rencana Pembangunan Daerah (RPD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Rancangan akhir Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto diverifikasi oleh Tim Validasi dan Verifikasi pada Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kota dan Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto dalam rangka penyelarasan Rancangan akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sesuai program dan kegiatan. Pelaksanakan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) menjadi pedoman bagi segenap aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto dalam menyusun rancangan Rencana Kerja (Renja) setiap tahun. Atas dasar itulah, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto adalah sebagai berikut:

1. Rencana Strategis (Renstra) menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) 2024, 2026.
2. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto akan diimplementasikan secara konsisten dengan mematuhi asas-asas pemerintahan umum yang berlaku. Pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto ini Kota Sawahlunto dilakukan sekurang- kurangnya sekali dalam lima tahun, dalam periode Rencana Strategis (Renstra) dokumen 3 (tiga) tahun yang mengacu pada tujuan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026.

3. Pengendalian dan evaluasi dilakukan pada tiap tahun pelaksanaan anggaran melalui evaluasi Rencana Kerja (Renja) per triwulan yang merupakan bagian integral dari pengendalian pencapaian sasaran serta indikator kinerja sekaligus dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto.
4. Dalam hal hasil pengendalian dan evaluasi terhadap Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto diperlukan adanya perbaikan atau revisi sesuai kebijakan perencanaan dan ekonomi daerah maka perbaikan tersebut dapat dituangkan pada Rencana Kerja (Renja) tahun rencana dan pada kesempatan yang sama Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sawahlunto dilakukan revisi oleh alasan yang dibenarkan menurut peraturan-perundangan.

Demikian Renstra Perangkat Daerah ini disusun untuk dapat dijadikan acuan dan pedoman oleh Kepala Perangkat Daerah beserta staff Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto dan diketahui pula oleh *stakeholder*.

Sawahlunto, Mei 2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA SAWAHLUNTO



Ir. YULIANTI

NIP. 1967070719940122003